



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

PERAN DINAS SOSIAL DALAM PEMBERDAYAAN PENYANDANG DISABILITAS DI KOTA PEKANBARU

SKRIPSI



Oleh :

RIFA'I ROFIQ
11770513229

PROGRAM S1

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
2021**



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PERAN DINAS SOSIAL DALAM PEMBERDAYAAN
PENYANDANG DISABILITAS
DI KOTA PEKANBARU**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mengikuti Sidang Skripsi Strata 1
pada Program studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Riau



UIN SUSKA RIAU

Oleh :

RIFA'I ROFIQ
11770513229

PROGRAM S1

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
2021**

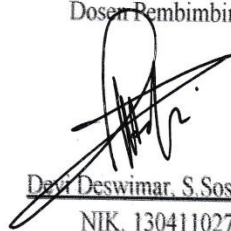


- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Rifa'i Rofiq
 Nim : 11770513229
 Fakultas : Ekonomi Dan Ilmu Sosial
 Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
 Judul : Peran Dinas Sosial Dalam Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Di Kota Pekanbaru

Disetujui Oleh :
 Dosen Pembimbing

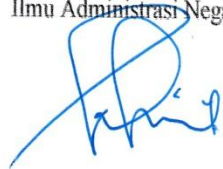

Deswimar, S.Sos, M.Si
 NIK. 130411027



Dekan
 Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial

DR. H. Mahyarni, SE.MM.,
 NIP. 197008261999032001

Ketua Program Studi
 Ilmu Administrasi Negara


Dr. Khairunyah Purba, S.Sos., M.si
 NIP. 197810252006041002



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : RIFA'I ROFIQ
NIM : 11770513229
PROGRAM STUDI : ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS : EKONOMI ILMU DAN SOSIAL
JUDUL : PERAN DINAS SOSIAL DALAM
PEMBERDAYAAN PENYANDANG
DISABILITAS DI KOTA PEKANBARU
TANGGAL UJIAN : 17 NOVEMBER 2021


Disetujui Oleh
KETUA PENGUJI


Dr. Kamaruddin S.Sos, M.si
NIP. 19790101 2007101 003

PENGUJI I


Pivit Septiary Chandra, M.Si
NIP. 19920925 201903 2 021

PENGUJI II


Irdyanti, S.IP, MA
NIK. 130 411 030



2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Lampiran Surat :

Nomor : Nomor 25/2021

Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : RIFA'I ROFIQ

NIM : 11770513229

Tempat/Tgl. Lahir : Pekanbaru, 03 Juli 1999

Fakultas/Pascasarjana : Ekonomi dan Ilmu Sosial

Prodi : Administrasi Negara

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:

Peran Dinas Sosial dalam pemberdayaan Penyandang
Disabilitas di Kota Pekanbaru

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

- Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
- Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
- Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
- Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 07 Desember 2021

Yang membuat pernyataan



NIM: 11770513229

* pilih salah satu sesuai jenis karya tulis



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

PERAN DINAS SOSIAL DALAM PEMBERDAYAAN PENYANDANG DISABILITAS DI KOTA PEKANBARU

Oleh :

RIFA'I ROFIQ
NIM. 11770513229

Penelitian ini dilakukan di Dinas Sosial Kota Pekanbaru adapun permasalahannya yaitu tercatat adanya peningkatan jumlah penyandang disabilitas tiap tahunnya dan diantaranya masih banyak yang belum terdata, oleh sebab itu diperlukannya pemberdayaan bagi para penyandang disabilitas. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Dinas Sosial Dalam Pemberdayaan Penyandang Disabilitas di Kota Pekanbaru. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi dan dokumentasi. Objek dari penelitian ini adalah Kantor Dinas Sosial Kota Pekanbaru. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan yang dilakukan oleh dinas sosial kota pekanbaru terhadap penyandang disabilitas dapat dikategorikan belum maksimal, dan belum maksimal dikarenakan kurangnya keseriusan dari kemensos dalam menyalurkan bantuan ke dinas sosial kota pekanbaru sehingga dari kemensos ke dinas sosial kota pekanbaru ke penyandang disabilitas belum maksimal dalam memberikan bantuan kepada para penyandang disabilitas. Adapun hambatannya yakni masih minimnya aksesibilitas bagi para penyandang disabilitas, kurang menentukannya bantuan yang diberikan, dan kurangnya sosialisasi yang diberikan bagi para penyandang disabilitas, serta perilaku kurang percaya diri yang ada pada para penyandang disabilitas.

Kata Kunci : Peran Dinas Sosial, Penyandang Disabilitas, Pemberdayaan

UIN SUSKA RIAU

KATA PENGANTAR



Assalamu 'alaikum warahmatullah wabarakatuh

Segala puji dan syukur kehadiran Allah *Subhanahu Wa'Ta'ala* atas Rahmat dan Karunia-Nya tiada terkira. Shalawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad SAW, semoga kita senantiasa menghidupkan sunnahnya disegala sendi kehidupan, sehingga kita menjadi umat yang mendapatkan syafa'atNya di kemudian hari, aamiin.

Penulisan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk menempuh Ujian Komperhensif Sarjana Prodi Ilmu Administrasi Negara Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, dengan judul **“Peran Dinas Sosial dalam Pemberdayaan Penyandang Disabilitas di Kota Pekanbaru”**.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu gelar strata (S1) prodi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam penulisan ini tidak terlepas dari bantuan banyak pihak, baik berupa dukungan materil, jasa terutama do'a. Pada kesempatan kali ini penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang sedikit banyaknya telah berpengaruh terhadap skripsi ini, khususnya kepada :

1. Kedua orang tua yang saya cintai karena Allah SWT, yang tidak pernah putus do'a, bantuan materil serta dukungannya yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Selain memberikan semangat, arahan, bimbingan, kasih sayang

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tanpa batas, mengingatkan selalu kita tidak sendiri karena Allah SWT selalu ada dimanapun kita berada sehingga penulis menjadi semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.

Bapak Prof.Dr.Khairunnas Rajab,M.Ag selaku Rektor UIN SUSKA Riau

Ibuk DR.Hj.Mahyarni,SE.MM., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultasn Syarif Kasim Riau.

Bapak Dr.Khairunsyah Purba, S.Sos., M.Si Selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara

5. Bapak Mashuri, M.A. Selaku Sekretaris Jurusan Program Studi Ilmu Administrasi Negara

6. Ibuk Abdiana Ilosa, S.Ap, MPA selaku dosen Penasehat Akademik, semoga Ibuk tetap dalam keadaan sehat

7. Ibuk Devi Deswimar, S.Sos., M.Si selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktunya dan memberi ilmu, arahan yang sangat baik dalam proses penyusunan skripsi ini, semoga Ibuk tetap dalam keadaan sehat dan diberikan keberkahan.

8. Seluruh dosen Administrasi Negara yang telah mengajarkan saya banyak ilmu, semoga selalu diberikan keberkahan.

9. Bapak Drs.Bustami, MM selaku Kepala Bidang Rehabilitasi di Dinas Sosial beserta pegawai yang bersedia membantu penulis dalam penelitian, semoga selalu diberikan kesehatan dan keberkahan.

10. Terima kasih kepada Efri Rahmawati S.Sos yang telah membantu saya dalam penyelesaian penelitian ini, semoga selalu diberikan kesehatan dan keberkahan.

11. Serta semua orang baik dan hebat yang tidak bisa disebutkan satu-satu, semoga selalu diberikan keehatan dan keberkahan/
Penulis berdoa agar segala bantuan dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis mendapat imbalan yang setimpal dari Allah SWT sebagai amal shalih.
Akhirnya pada Allah SWT penulis memohon agar usaha ini dijadikan salah satu amal shalih dan bermanfaat untuk lingkup akademisi kedepannya.
- Pekanbaru, 9 November 2021
Penulis
- RIFA'I ROFIQ**
NIM. 11770513229



DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	8
1.5 Sistematika Penulisan	9
BAB II. LANDASAN TEORI	
2.1 Konsep Peran	11
2.2 Pemberdayaan	14
2.3 Penyandang Disabilitas	19
2.4 Penelitian Terdahulu	24
2.5 Pandangan Islam tentang Pemberdayaan	25
2.6 Definisi Konsep	27
2.7 Konsep Operasional	28
2.8 Kerangka Berfikir	30
BAB III. METODE PENELITIAN	
3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian	31
3.2 Jenis Penelitian	31
3.3 Jenis dan Sumber Data	31
3.4 Informan Penelitian	32
3.5 Teknik Pengumpulan Data	33
3.6 Teknik Analisa Data	34



BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1. Gambaran Umum Kota Pekanbaru	37
4.2. Sejarah Dinas Sosial Kota Pekanbaru	37
4.3. Visi dan Misi Dinas Sosial Kota Pekanbaru	40
4.4. Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Pekanbaru	42

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1. Pelaksanaan Dinas Sosial Kota Pekanbaru dalam PEMBERDAYAAN Penyandang Disabilitas di Kota Pekanbaru	51
5.2. Hambatan Dalam PEMBERDAYAAN Penyandang Disabilitas	66

BAB VI PENUTUP

6.1. Kesimpulan	69
6.2. Saran	70

DAFTAR PUSTAKA

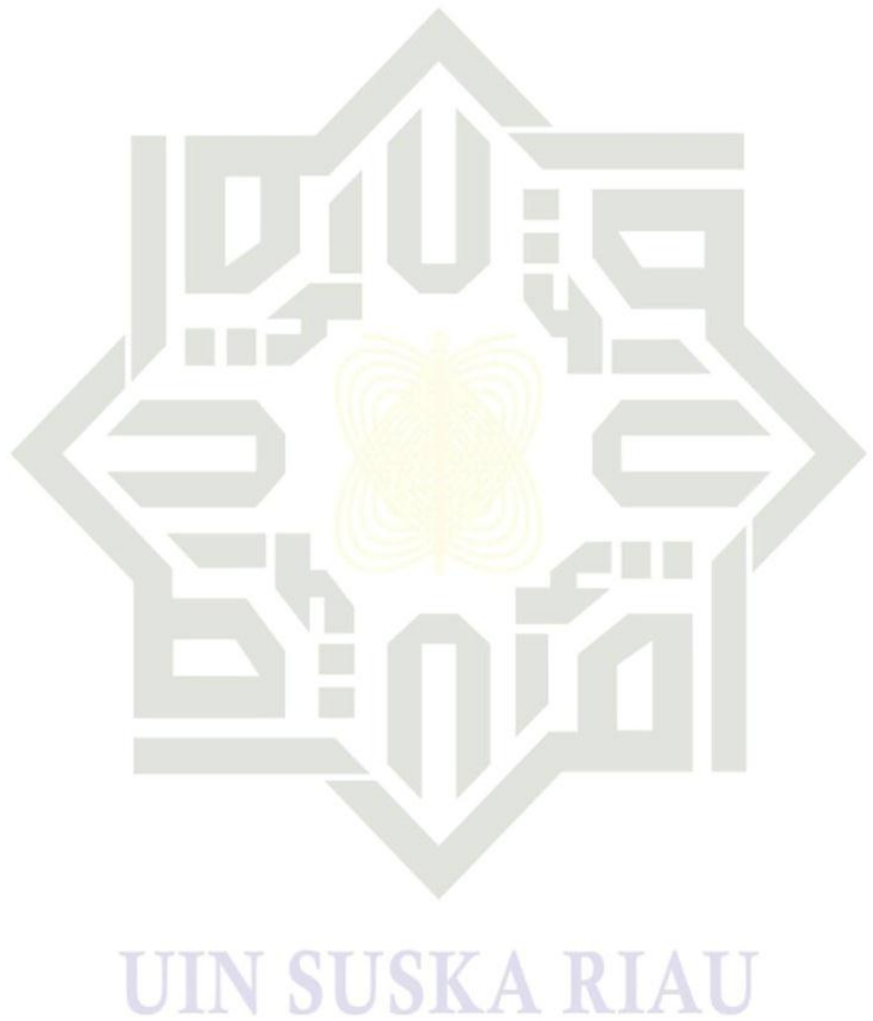
LAMPIRAN

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Jumlah Penyandang Disabilitas di Pekanbaru	5
Jumlah Penyandang Disabilitas di Pekanbaru Tahun 2020..	6
Konsep Operasional	29



DAFTAR GAMBAR

<p>© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau</p> <p>State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau</p> <p>Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang</p> <p>1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan sumber.</p> <p>a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.</p> <p>b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.</p> <p>2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.</p>	<p>Gambar 2.1 Kerangka Berfikir 30</p> <p>Gambar 4.1 Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Pekanbaru..... 42</p> <p>Gambar 5.1 Parkir Khusus Disabilitas di Bandara Sultan Syarif Qasim II 54</p> <p>Gambar 5.2 Jalan Kusus Disabilitas 54</p> <p>Gambar 5.3 Penyediaan Kursi Roda Untuk Disabilitas di Bandara Sultan Syarif Qasim II 55</p> <p>Gambar 5.4 Penyebrangan Jalan Khusus Tuna Netra di Jalan Jendral Sudirman 55</p> <p>Gambar 5.5 Trotoar Ramah Disabilitas 56</p> <p>Gambar 5.6 Fasilitas Kursi Roda di Mall Pelayanan Publik 56</p> <p>Gambar 5.7 Antrian khusus bagi para Penyandang Disabilitas 57</p> <p>Gambar 5.8 Gambar Pelayanan Umum yang diberikan khusus bagi Para Penyandang Disabilitas 57</p> <p>Gambar 5.9 Penampakan Halte Trans Metro Pekanbaru 58</p> <p>Gambar 5.10 Gedung Shelter 60</p>
--	---

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap orang di dunia ini dilahirkan dengan berbagai perbedaan. Tidak ada orang yang terlahir sama meskipun mereka adalah kembar. Perbedaan tersebut bisa melalui perbedaan fisik maupun non-fisik. Merupakan hal yang wajar jika kita berbeda dalam segala hal, contohnya perbedaan warna kulit, bentuk fisik, kecerdasan dan perbedaan-perbedaan lainnya. Oleh karena itu, bukan hal yang mengherankan jika dalam kehidupan sehari-hari kita sering menjumpai banyak saudara-saudara kita yang merupakan penyandang disabilitas (Yakobus N. Alapraing, 2016).

World Report Disability yang dipublikasikan oleh WHO tahun 2011, menyebutkan bahwa penyandang disabilitas telah diklasifikasikan ke dalam model biopsikososial, yang berarti penyandang disabilitas dilihat berdasarkan masalah kondisi kesehatan yang dialami, seperti kerusakan atau hilangnya salah satu bagian tubuh sehingga kondisi tersebut menghambat individu untuk melakukan aktivitas, dan menimbulkan masalah di kehidupan sosial mereka seperti sulitnya mengakses aspek penting kehidupan yang seharusnya dapat dijangkau oleh seluruh masyarakat termasuk penyandang disabilitas menurut Alda Nurhaliza Rizqia dan Hartuti Purnaweni (2021). Sedangkan pengertian difabel menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan aktivitas



2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang menyalin, menduplikasi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

secara selaknyaknya, terdiri dari : penyandang cacat fisik, penyandang cacat mental, dan penyandang cacat fisik dan mental (Agnesia Allensky, 2017). Kemudian menurut Utami Dewi (2015) menjadi difabel sering diidentikkan dengan ketidakberuntungan dalam hidup karena kesulitan dalam mendapatkan pendidikan dan persamaan hak baik dalam pendidikan, kesehatan, sosial dan akses terhadap sarana dan prasarana bangunan atau gedung. Keadaan seperti ini menyebabkan kelompok difabel menjadi kelompok minoritas yang kadang terlepas dari jangkauan pemerintah. Padahal, kelompok difabel adalah juga warga negara yang memiliki kesamaan hak dan kewajiban yang sama dengan warga negara lainnya.

Penyandang disabilitas saat ini masih dipandang sebelah mata, dianggap remeh karena tidak memiliki kesempurnaan secara fisik untuk melakukan suatu pekerjaan atau aktivitas tertentu. Rata-rata penyandang disabilitas memiliki background keluarga yang kurang mampu dan terbelakang. Dari segi kesejahteraan penyandang disabilitas sangat jauh sekali dari perhatian pemerintah dilihat sekarang mulai banyaknya peraturan perundang-undangan ataupun kebijakan yang mengatur tentang hak penyandang disabilitas dari usia balita sampai manula.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 bagian ke 13 tentang Hak Kesejahteraan Sosial : Dimana hak kesejahteraan sosial untuk penyandang disabilitas meliputi hak rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial. Berdasarkan undang-undang tersebut dapat dijelaskan bahwa penyandang disabilitas dilindungi oleh negara dan tetap diberikan hak



2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

untuk hidup dengan sejahtera tanpa harus adanya diskriminasi antar sesama masyarakat (Djoko Susano dan Heylen Amildha Yanuarita, 2021). Kemudian menurut Iik Sakinah, Slamet Muchsin dan Suyeno (2020), setiap warga negara memiliki hak yang sama, peluang yang sama dan kedudukan yang sama dihadapan hukum, termasuk mengakui hak-hak penyandang disabilitas di Indonesia.

Seiring dengan meningkatnya kesadaran umum atas pemenuhan hak asasi manusia bagi setiap orang tanpa memandang atribut apapun yang melekat pada dirinya, berbagai jenis pelayanan sosial bagi kelompok penyandang disabilitas kini mulai dilihat sebagai hak dari para penyandang disabilitas yang harus disediakan oleh masyarakat, terutama negara. Pergeseran perspektif dalam mengkaji wacana-wacana terkait disabilitas ditengarai sebagai faktor utama yang melahirkan pandangan-pandangan yang demikian. Dampak dari pergeseran pandangan tersebut cukup signifikan, salah satunya adalah menguatnya kesadaran bahwa penyediaan layanan sosial bagi kelompok penyandang disabilitas tidak cukup dilakukan melalui mekanisme berbasis *charity* (Sy. Nurul Syobah, 2018)

Disamping itu, penyandang disabilitas juga berhak mendapatkan pelayanan yang sama dengan orang lain dalam bidang kesehatan, administrasi kependudukan bahkan sampai pelayanan pada saat pemilu. Hak-hak penyandang disabilitas ditegaskan dalam pasal 42 Undang-Undang Dasar Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi : Setiap warga negara yang berusia lanjut, cacat fisik dan/atau cacat mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, bantuan khusus atas biaya negara, untuk menjamin kehidupan yang layak sesuai dengan martabat kehidupannya, meningkatkan rasa



2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang menyalin, mengutip, atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

percaya diri dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (Krisnada dan Sugeng Widodo, 2019).

Menurut Syafrites Indrion, Zaili Rusli dan Febri Yuliani (2021) Kota Pekanbaru merupakan salah satu kota di Indonesia yang memiliki penyandang disabilitas yang membutuhkan pekerjaan yang layak dan tanpa diskriminasi. Penyandang disabilitas di Indonesia saat ini menjadi perhatian khusus dari pemerintah pusat maupun oleh pemerintah daerah, khususnya oleh Dinas Sosial dan Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru. Banyaknya penyandang disabilitas di Kota Pekanbaru yang mempunyai kemampuan dan keahlian di berbagai bidang, namun masih banyak para penyandang disabilitas tersebut yang belum mendapatkan penghidupan yang layak serta belum bisa memberikan sumbangsi untuk bangsa dan negara. Keadaan seperti itu membuat kondisi mental para penyandang disabilitas terpengaruh yang akan memperburuk kondisis penyandang disabilitas tersebut secara keseluruhan.

Dinas Sosial merupakan unsur pelaksana urusan pemerintah di bidang sosial dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan. Dinas Sosial dan pemberdayaan masyarakat mempunyai tugas membantu walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan serta tugas pembantuan menurut Theresia Baturangka, J.E. Kawoon dan Frans Singkoh (2019). Hal ini sangat berperan penting dalam membantu melakukan pemberdayaan bagi para penyandang disabilitas, mengingat banyaknya penyandang disabilitas dari tahun ke tahun. Adapun mekanisme yang diterapkan dalam pendataan data bagi para penyandang disabilitas di Kota Pekanbaru, yaitu :



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Mereka datang sendiri ke Dinas Sosial untuk mendaftarkan diri, agar mereka dapat dibantu oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru.

2. Ada juga melalui RT/RW untuk mendata, bahwa mereka ada salah satu anggota keluarga yang disabilitas, kemudian pihak RT/RW akan mengantarkan berkas permohonan ke Dinas Sosial Pekanbaru.

3. Adapun dari pihak Dinas Sosial Kota Pekanbaru sendiri yang turun langsung untuk mendata para disabilitas melalui informasi yang diberikan oleh RT/RW setempat.

Berdasarkan keterangan di atas bahwasanya untuk mekanisme dalam pendataan para penyandang disabilitas dapat dilakukan dengan beragam cara, sesuai dengan mana baiknya yang lebih efektif dilakukan dan efisien bagi para penyandang disabilitas.

Berikut ini adalah data jumlah penyandang disabilitas di Kota Pekanbaru:

Tabel 1.1 Jumlah Penyandang Disabilitas di Pekanbaru Tahun 2019

NO	KECAMATAN	PENYANDANG DISABILITAS						
		tuna netra	Tuna rungu	Tuna daksa	Grahita	Autis	gangguan mental	Ganda
1	Tampian	19	18	35	14	3	13	9
2	Pasung Sekaki	4	2	8	0	5	10	6
3	Bukit Raya	20	9	15	8	3	21	12
4	Marpoyan Damai	14	17	25	22	1	20	29
5	Tenayan Raya	11	25	54	16	12	18	15
6	Lima Puluh	6	17	8	10	5	8	3
7	Sairi	6	2	13	5	2	3	8
8	Pekanbaru Kota	12	5	16	17	0	6	11
9	Sukajadi	5	11	9	18	4	12	5
10	Rumbai	4	3	7	9	4	7	6
11	Rumbai Pesisir	10	19	44	15	16	44	7
12	Senapelan	6	9	24	7	9	16	7
Jumlah		117	137	258	141	64	178	118

(Sumber: Dinas Sosial Kota Pekanbaru 2019)



Tabel 1.2 Jumlah Penyandang Disabilitas di Pekanbaru Tahun 2020

KECAMATAN	PENYANDANG DISABILITAS						
	tuna netra	Tuna rungu	Tuna daksa	Grahitita	autis	gangguan mental	Ganda
1. Tampan	21	19	39	16	3	13	9
2. Payung Sekaki	5	2	8	0	6	10	6
3. Bukit Raya	23	10	16	10	4	21	12
4. Marpoyan Damai	15	20	27	24	1	20	29
5. Tenayan Raya	12	28	56	18	13	21	15
6. Lima Puluh	7	18	8	10	6	10	3
7. Sail	7	2	13	5	2	3	8
8. Pekanbaru Kota	12	5	16	17	0	6	11
9. Sukajadi	5	11	9	18	4	12	5
10. Rumbai	4	3	7	9	4	7	6
11. Rumbai Pesisir	10	19	44	15	16	44	7
12. Senapelan	6	9	24	7	9	16	7
Jumlah	127	146	267	149	68	183	118

Sumber: Dinas Sosial Kota Pekanbaru 2020)

Berdasarkan data dari Dinas Sosial tahun 2020 penyandang disabilitas di Kota Pekanbaru berjumlah 1058 orang, dan terdapat peningkatan dari tahun sebelumnya yang berjumlah 1013 orang.

Maka dari itu peran pemerintah sangatlah perlu dalam pembinaan pemberdayaan penyandang disabilitas. Lewat Dinas Sosial pemberdayaan penyandang disabilitas lebih terarah dan fokus. Adapun upaya-upaya yang dilakukan Dinas Sosial dalam pemberdayaan penyandang disabilitas yaitu diantaranya :

1. Pemberdayaan bagi penyandang disabilitas merupakan suatu upaya untuk membantu meringankan beban dalam mencapai kesejahteraannya, dengan mendayagunakan agar dapat mengembangkan kemampuan yang dimiliki melalui pembinaan dan pelatihan yang intensif, sehingga mereka nantinya mempunyai bekal untuk dapat hidup secara mandiri tanpa bergantung kepada orang lain.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang menjiplak atau menyalin seluruh atau sebagian dari karya tulis ini tanpa izin UIN Suska Riau.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Bantuan sosial yaitu pemberian bahan sembako dan uang yang nantinya dapat digunakan dalam kebutuhan sehari-hari

Dinas Sosial Kota Pekanbaru selaku pelaksana di bidang sosial, dalam menjalankan tugasnya Dinas Sosial yakni pemberdayaan penyandang disabilitas seperti aksesibilitas, rehabilitasi sosial, bantuan sosial serta memberikan taraf kesejahteraan sosial dalam rangka meningkatkan kemandirian serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Program kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru selaku instansi yang menangani masalah penyandang disabilitas yaitu adanya pembinaan mental dan pelatihan usaha serta bantuan sosial. Dimana kegiatan pemberdayaan yang diberikan dengan memberikan bantuan penguatan modal usaha untuk kegiatan usaha ekonomi dan pemberian alat-alat bantu khusus yang dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan penyandang disabilitas.

Peran Dinas Sosial dalam penanganan penyandang disabilitas masih terbatas. Keterbatasan sebagaimana terkait pada penanganan penyandang disabilitas yang tidak merata, sehingga masih terdapat penyandang disabilitas yang belum tersentuh dalam penyuluhan/sosialisasi mengenai adanya pelatihan usaha, adanya bantuan sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kemandirian penyandang disabilitas di Kota Pekanbaru.

Dinas Sosial selaku instansi yang menaungi penyandang disabilitas harus mampu berperan secara maksimal untuk memberdayakan para penyandang disabilitas. Sehingga selain dapat mengurangi beban dari keluarga, juga dapat mengurangi tingkat pengangguran dan tingkat pengemis di Kota Pekanbaru serta



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dapat meningkatkan taraf kemandirian penyandang disabilitas. Berdasarkan fenomena yang telah diuraikan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul **“Peran Dinas Sosial dalam Pemberdayaan Penyandang Disabilitas di Kota Pekanbaru”**.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan Permasalahan yang di ungkapkan pada latar belakang, maka penulis dalam penelitian merumuskan masalah adalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana pelaksanaan Dinas Sosial Dalam Pemberdayaan Penyandang Disabilitas di Kota Pekanbaru?
- b. Apa saja faktor-faktor penghambat Dinas Sosial dalam Pemberdayaan Penyandang Disabilitas di Kota Pekanbaru?

3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah di uraikan diatas, maka penulis dalam penelitian ini membuat tujuan penelitian yaitu :

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan Dinas Sosial Dalam Pemberdayaan Penyandang Disabilitas di Kota Pekanbaru
- b. Untuk mengetahui apa saja faktor-faktor penghambat Dinas Sosial dalam Pemberdayaan Penyandang Disabilitas di Kota Pekanbaru

1.4 Manfaat Penelitian

Dari judul penelitian tersebut penulis berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat yang secara teoritis maupun secara praktis. Berikut Manfaat dari pada penelitian ini adalah :



1. Manfaat secara teoritis

- a. Hasil dari penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dan pengembangan pengetahuan yang berhubungan dengan organisasi pemerintahan.
- b. Memberikan kesempatan kepada peneliti untuk mengaplikasikan ilmu dan teori yang dipelajari selama ini.
- c. Menambah ilmu pengetahuan melalui penelitian yang dilaksanakan sehingga memberikan kontribusi khususnya bagi pengembangan ilmu administrasi negara.

Manfaat secara praktis

- a. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan saran atau masukan kepada para pejabat dinas sosial dalam pemberdayaan masyarakat
- b. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi kepada masyarakat mengenai pemberdayaan penyandang disabilitas.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan berisikan bab demi bab dalam laporan yang terdiri

dari :

BAB I : Pendahuluan

Pada bab ini berisikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB II : Landasan Teori

Pada bab ini penulis akan membahas mengenai teori teori atau konsep yang sesuai dan melandasi penelitian sehingga dapat mendukung penelitian yang dilakukan

BAB III : Metode Penelitian

Pada bab ini berisikan tentang lokasi dan waktu penelitian jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, populasi dan sampel, dan analisa data yang telah dikumpulkan

BAB IV : Gambaran Umum Objek Penelitian

Pada bab ini berisikan tentang objek yang akan diteliti dan tempat dimana akan dilakukan penelitian, seperti lokasi penelitian, karakteristik dan demografi

BAB V : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada bab ini membahas hasil dari penelitian tentang Peran Dinas Sosial Dalam Pemberdayaan Penyandang Disabilitas di Kota Pekanbaru

BAB VI : Penutup

Pada bab ini berisikan kesimpulan dari penelitian serta kritik dan saran yang membangun bagi objek penelitian agar bisa lebih baik lagi kedepannya

BAB II

LANDASAN TEORI

2. Konsep Peran

2.1. Pengertian Peran

Peran adalah seperangkat tingkat yang diharapkan yang dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Sedangkan definisi lain, peran adalah konsep mengenai apa yang dapat dilakukan oleh individu maupun kelompok dalam masyarakat sebagai organisasi atau individu yang penting bagi struktur sosial. Menurut Soekanto, peran adalah aspek dinamis dari kedudukan (status) dengan kedudukannya, maka dia telah menjalankan suatu peran. Pada definisi lain, peran diartikan sebagai sudut pandang dalam sosiologi dan psikologi sosial yang menganggap sebgai besar aktivitas harian yang diperankan oleh kategori-kategori yang ditetapkan secara sosial, misalnya ibu, manajer, guru dan lainnya.

Peran adalah aspek dinamis yang berupa tindakan atau perilaku yang dilaksanakan oleh seseorang yang menempati atau mengaku suatu posisi dalam melaksanakan hak- hak kewajiban sesuai dengan kedudukannya. Jika seseorang menjalankan peran tersebut dengan baik, dengan sendirinya akan berharap bahwa apa yang dijalankan sesuai keinginan dari lingkungannya.

2.1.2. Macam-macam Peran

Seseorang pengembang masyarakat mempunyai tugas utama, yaitu mengembangkan kapasitas pelaku masyarakat agar mampu mengorganisir dan menentukan secara mandiri terhadap upaya-upaya yang diperlukan dalam



2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang menyalin, mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

kehidupan yang dijalaninya. Seorang pengembang masyarakat memiliki beberapa peran yang harus dilakukan dalam melakukan pengembangan terhadap suatu masyarakat, beberapa peran tersebut yaitu:

Mengorganisasi

Menurut Jim Ife dan Frank Tesoriero mengungkapkan bahwa salah satu peran dalam pemberdayaan adalah dengan mengorganisasi yaitu peran yang harus dilakukan oleh pekerja sosial untuk melibatkan kemampuan berfikir masyarakat secara bersama-sama dalam melakukan pembangunan, yaitu melalui apa yang dibutuhkan dapat diselesaikan tanpa harus melakukannya seorang diri, namun dilakukan secara bersama-sama untuk memudahkan pekerjaan yang harus diselesaikan.

Fasilitator

Fasilitator yaitu peran-peran yang dijalankan seorang pengembang masyarakat dengan cara memberikan stimulan dan dukungan kepada masyarakat. Peran ini meliputi, *pertama* membangun kesepakatan yakni membuat kesepakatan secara bersama-sama dengan melalui forum pertemuan, dimana pada kesepakatan tersebut harus mendapat persetujuan dari pihak yang terlibat. *Kedua*, menurut Persons jorgensesns dan Hernandez yang dikutip oleh Eddy Soeharto mengungkapkan bahwa salah satu peran dalam fasilitator yaitu dorongan melaksanakan tugas yang sudah terjadi tanggung jawabnya. Dimana dorongan tersebut harus dilakukan agar masyarakat dapat melaksanakan dan selalu mempunyai semangat dalam menyelesaikan kegiatan yang berlangsung. *Ketiga*, mengaktifkan masyarakat, dimana



menurut Aziz Muslim, bahwa mengaktifkan masyarakat merupakan salah satu dalam melakukan pemberdayaan masyarakat.

Pendidikan

Pendidikan yaitu peran-peran kependidikan kepada masyarakat. Dalam pengembangan masyarakat terjadi proses pembelajaran secara terus-menerus dari masyarakat maupun pekerja kemasyarakatan untuk selalu memperbaiki keterampilan dan cara berfikir masyarakat agar dapat berkembang dan menjadi lebih baik

Keterampilan teknik

Keterampilan Teknik yaitu pengembangan masyarakat dalam menerapkan keterampilan teknik untuk mengembangkan masyarakat. Beberapa dimensi pekerjaannya yakni pemakaian komputer, penyajian laporan secara lisan dan tertulis, penanganan proyek pembangunan secara fisik dan lainnya, yang mana semuanya itu sangat membutuhkan keterampilan teknis.

Perwakilan

Perwakilan yaitu peran yang dilakukan oleh pengembang masyarakat dalam interaksinya dengan lembaga luar atas nama masyarakat dan untuk kepentingan masyarakat. Dimana setelah mendapatkan hasil dari interaksi yang dilaksanakan, maka seorang pengembang masyarakat harus menyampaikan informasi tersebut kepada masyarakat. Peran perwakilan ini meliputi usaha mendapatkan sumber-sumber, sharing pengalaman dan pengetahuan serta jadi juru bicara masyarakat.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



2.2 Pemberdayaan

2.2.1. Pengertian Pemberdayaan

Pemberdayaan masyarakat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI, 2008) adalah proses, cara, membuat, memberdayakan dari kata daya yaitu kemampuan melakukan sesuatu atau kemampuan untuk bertindak. Secara konseptual pemberdayaan atau pemberkuasaan (*empowerment*) berasal dari kata *power* (kekuasaan atau keberdayaan).

Istilah pemberdayaan juga dapat diartikan sebagai upaya memenuhi kebutuhan yang diinginkan oleh individu, kelompok, dan masyarakat luas agar mereka memiliki kemampuan untuk melakukan pilihan dan mengontrol lingkungannya agar dapat memenuhi keinginan-keinginannya, termasuk aksesibilitasnya terhadap sumber daya yang terkait dengan pekerjaannya, aktivitas sosialnya, dan lain-lain.

Menurut Ife pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kekuasaan orang-orang yang lemah atau tidak beruntung. Masih dalam buku tersebut, Parson mengatakan bahwa pemberdayaan adalah sebuah proses dimana orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam berbagai pengontrolan dan mempengaruhi terhadap kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya.

Pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup untuk memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya. Sedangkan menurut swift dan levin dalam membangun masyarakat, memberdayakan rakyat, pemberdayaan



menunjuk pada usaha pengalokasian kembali kekuasaan melalui perubahan struktur sosial.

Berdasarkan beragam definisi pemberdayaan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok rentan dan lemah dalam masyarakat, termasuk individu- individu yang mengalami masalah kemiskinan, sehingga mereka memiliki keberdayaan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti: memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya. Adapun cara yang ditempuh dalam melakukan pemberdayaan yaitu dengan memberikan motivasi atau dukungan berupa penyediaan sumber daya, kesempatan, pengetahuan dan keterampilan bagi masyarakat untuk meningkatkan kapasitas mereka, meningkatkan kesadaran tentang potensi yang dimilikinya, kemudian berupaya untuk mengembangkan potensi yang dimiliki mereka.

2.2.2. Tujuan Pemberdayaan

Tujuan utama pemberdayaan adalah memperkuat kekuasaan masyarakat khususnya kelompok lemah yang memiliki ketidakberdayaan, baik karena kondisi internal (misalnya persepsi mereka sendiri), maupun karena kondisi eksternal (misalnya ditindas oleh struktur sosial yang tidak adil).

Menurut Agus Ahmad Syafi'i, tujuan pemberdayaan masyarakat adalah memandirikan masyarakat atau membangun kemampuan untuk memajukan diri ke arah kehidupan yang lebih baik secara seimbang. Karenanya pemberdayaan



2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

masyarakat adalah upaya memperluas horizon pilihan bagi masyarakat. Ini berarti masyarakat diberdayakan untuk melihat dan memilih sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya.

Payne mengemukakan bahwa suatu proses pemberdayaan (*Empowerment*) pada intinya bertujuan: membantu klien memperoleh daya untuk mengambil keputusan dan menentukan tindakan yang akan ia lakukan terkait dengan diri mereka termasuk mengurangi efek hambatan pribadi dan sosial dalam melakukan tindakan. Hal ini dilakukan melalui peningkatan kemampuan dan rasa percaya diri untuk menggunakan daya yang ia miliki, antara lain melalui transfer daya dari pengungkannya

2.3. Pendekatan Pemberdayaan

Pelaksanaan proses dan pencapaian tujuan pemberdayaan melalui beberapa penerapan pendekatan pemberdayaan:

Pemungkinan: menciptakan suasana yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang secara optimal. Pemberdayaan harus mampu membebaskan masyarakat dari sekat-sekat kultural dan struktural yang menghambat.

Penguatan: memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Pemberdayaan harus mampu menumbuhkan kemampuan diri mereka. Dengan mengembangkan kapasitas masyarakat melalui bantuan peningkatan keterampilan dan pengetahuan, penyediaan sarana dan prasarana seperti modal, informasi pasar dan teknologi sehingga dapat memperluas kerja dan memberikan pendapatan yang layak.



2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

c. Perlindungan: melindungi masyarakat terutama kelompok-kelompok terutama kelompok-kelompok lemah agar tidak tertindas oleh kelompok kuat, mencegah terjadinya eksploitasi kelompok kuat terhadap kelompok lemah. Pemberdayaan harus diarahkan pada penghapusan segala jenis diskriminasi dan dominasi yang tidak menguntungkan pihak yang lemah.

Penyokongan: memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat mampu menjalankan peranan dan tugas-tugas kehidupannya. Pemberdayaan harus mampu menyokong masyarakat agar tidak terjatuh kedalam keadaan dan posisi yang semakin lemah dan terpinggirkan.

Pemeliharaan: memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadi keseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok dalam masyarakat. Pemberdayaan harus mampu menjamin keselarasan dan keseimbangan yang memungkinkan setiap orang memperoleh kesempatan berusaha.

2.2.4. Strategi Pemberdayaan

Menyatakan bahwa proses pemberdayaan umumnya dilakukan secara kolektif. Menurut Iffe, tidak ada literatur yang menyatakan bahwa proses pemberdayaan terjadi dalam relasi satu lawan satu antara pekerja sosial dan klien dalam setting pertolongan perseorangan. Meskipun pemberdayaan seperti ini dapat meningkatkan rasa percaya diri klien, hal ini bukanlah strategi utama pemberdayaan.

Dalam konteks pekerja sosial, pemberdayaan dapat dilakukan melalui tiga aras atau matra pemberdayaan (*empowerment setting*): mikro, mezzo, dan makro.

Untuk lebih jelasnya yaitu sebagai berikut:



2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

1. Aras Mikro. Pemberdayaan dilakukan terhadap klien secara individu melalui bimbingan, konseling, *stress management*, *crisis intervention*. Tujuan utamanya adalah membimbing, atau melatih klien dalam menjalankan tugas-tugas kehidupannya. Model ini sering disebut sebagai pendekatan yang berpusat pada tugas (*task centered approach*).

Aras Mezzo. Pemberdayaan dilakukan terhadap sekelompok klien. Pemberdayaan dilakukan dengan menggunakan kelompok sebagai media intervensi. Pendidikan dan pelatihan, dinamika kelompok, biasanya digunakan sebagai strategi dalam meningkatkan kesadaran, pengetahuan, keterampilan dan sikap-sikap klien agar memiliki kemampuan memecahkan permasalahan yang dihadapinya.

Aras Makro. Pendekatan ini disebut juga sebagai Strategi Sistem Besar (*large system strategy*), karena sasaran perubahan diarahkan pada sistem lingkungan yang lebih luas. Perumusan kebijakan, perencanaan sosial, kampanye, aksi sosial, *lobbying*, pengorganisasian masyarakat, manajemen konflik, adalah beberapa strategi dalam pendekatan ini. Strategi Sistem Besar memandang klien sebagai orang yang memiliki kompetensi untuk memahami situasi-situasi mereka sendiri, dan untuk memilih mereka serta menentukan strategi yang tepat untuk bertindak.

Dengan Merujuk pada tujuan pemberdayaan, tahapan pemberdayaan, dan strategi pemberdayaan yang telah dipaparkan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pada hakikatnya pemberdayaan adalah suatu upaya untuk meningkatkan kapasitas masyarakat yang mengalami kerentanan sosial (seperti: masalah kemiskinan, penyandang cacat, manula, perbedaan etnis, dan ketidakadilan



Hal ini bertujuan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat di lingkungan UIN Suska Riau. Hal ini juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat di lingkungan UIN Suska Riau.

gender). Upaya pemberdayaan tersebut ditujukan agar masyarakat dapat hidup sejahtera.

Disimpulkan bahwa konsep dasar pemberdayaan pada dasarnya yaitu upaya suatu kelompok masyarakat untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian sehingga masyarakat dapat mengaktualisasikan potensi yang sudah dimiliki dalam pemberdayaan yang bisa mengembangkan masyarakat ke arah yang lebih sesuai dengan tujuan pemberdayaan.

2.3 Penyandang Disabilitas

2.3.1. Pengertian dan Konsep Penyandang Disabilitas

WHO mendefinisikan disabilitas sebagai “*A restriction or inability to perform an activity in the manner or within the range considered normal for a human being, mostly resulting from impairment*”. Definisi tersebut menyatakan dengan dengan jelas bahwa disabilitas merupakan pembatasan atau ketidakmampuan untuk melakukan suatu kegiatan dengan cara yang atau dalam bentuk dianggap normal bagi manusia, sebagian besar akibat penurunan kemampuan.

Secara yuridis pengertian penyandang cacat diatur dalam Pasal 1 ayat (1) UU Penyandang Cacat sebagai berikut: Setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan kegiatan secara selayaknya, yang terdiri dari:

- Penyandang cacat fisik
- Penyandang cacat mental
- Penyandang cacat fisik dan mental



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengertian ini sama dengan pengertian yang tercantun dalam Pasal 1 ayat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1998 tentang upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat.

Dalam UU HAM, penyandang disabilitas merupakan kelompok masyarakat rentan yang berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, ditegaskan bahwa penyandang disabilitas digolongkan sebagai bagian dari masyarakat yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial.

Menurut *Convention On The Rights of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) yang telah disahkan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011, penyandang disabilitas termasuk mereka yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama dimana ketika berhadapan dengan berbagai hambatan, hal ini dapat menghalangi partisipasi penuh dan efektif mereka dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya. Konvensi ini tidak memberikan batasan tentang penyandang cacat. Dalam konvensi ini penyandang cacat disebut sebagai penyandang disabilitas.

Menurut UU Penyandang Cacat, berbagai faktor penyebab serta permasalahan kecacatan, maka jenis-jenis kecacatan dapat di kelompokkan sebagai berikut :

1. Penyandang Cacat Fisik

Tuna Netra adalah seseorang yang terhambat mobilitas gerak yang disebabkan oleh hilang/berkurangnya fungsi penglihatan sebagai akibat dari kelahiran, kecelakaan maupun penyakit.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tuna Rungu/ Wicara adalah kecacatan sebagai akibat hilangnya/terganggunya fungsi pendengaran dan atau fungsi bicara baik disebabkan oleh kelahiran, kecelakaan maupun penyakit, terdiri dari tuna rungu, tuna wicara, tuna rungu, tuna wicara.

Tuna Daksa adalah cacat pada bagian anggota gerak tubuh. Tuna daksa dapat diartikan sebagai suatu keadaan rusak atau terganggu, sebagai akibat gangguan bentuk atau hambatan pada tulang, otot, dan sendi dalam fungsinya yang normal. Kondisi ini dapat disebabkan oleh penyakit, kecelakaan atau dapat juga disebabkan oleh pembawaan sifat lahir Pada orang tuna daksa ini terlihat kelainan bentuk tubuh, anggota atau otot, berkurangnya fungsi tulang, otot sendi maupun syaraf-syarafnya.

Penyandang Cacat Mental

a. Tuna Laras, dikelompokkan dengan anak yang mengalami gangguan emosi. Gangguan yang muncul pada individu yang berupa gangguan perilaku seperti suka menyakiti diri sendiri, suka menyerang teman, dan lainnya.

Tuna Grahita, sering dikenal dengan cacat mental yaitu kemampuan mental yang berada di bawah normal. Tolak ukurnya adalah tingkat kecerdasan atau IQ.

3. Penyandang Cacat Fisik dan Mental Ganda

Merupakan mereka yang menyandang lebih dari satu jenis kelainan, misalnya penyandang tuna netra dengan tuna rungu sekaligus, penyandang tuna daksa disertai dengan tuna grahita atau bahkan sekaligus.



2.3.2. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 18 Tahun 2013 Tentang

Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 yang dimaksud dengan Peraturan daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.

Pada bagaian pasal 9 ayat 1 dalam Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 18 tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas

Dijelaskan bahwa perlindungan penyandang disabilitas adalah upaya penghormatan dan pemenuhan kesamaan kesempatan bagi penyandang disabilitas yang meliputi :

Aksesibilitas

Aksesibilitas adalah ruang bebas hambatan / kemudahan yang disediakan bagi penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam berpartisipasi untuk pemanfaatan dan penggunaan bangunan umum, lingkungan dan transportasi umum. Dijelaskan penyediaan aksesibilitas yang dimaksud berbentuk fisik dan non fisik. Penyediaan aksesibilitas yang berbentuk fisik berupa sarana dan prasarana umum serta lingkungan, serta transportasi.

Selanjutnya penyediaan aksesibilitas yang berbentuk non fisik pada sarana dan prasarana umum serta lingkungan dan sarana angkutan umum sebagaimana dimaksud meliputi pelayanan informasi dan pelayanan khusus, maksud dari pelayanan informasi khusus adalah seperti penyandang tuna netra diberikan pelayanan informasi berupa huruf braile dan tuna rungu diberikan pelayanan informasi berupa isyarat tangan agar mereka dapat memahami

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



pesan dan informasi yang diberikan, sedangkan pelayanan khusus adalah penyandang disabilitas didahulukan dalam pelayanan dibandingkan masyarakat awam mengingat kondisi mereka yang dirasa tidak memungkinkan untuk menunggu pelayanan.

Rehabilitasi

Rehabilitasi adalah proses optimalisasi dan pengembangan diri untuk memungkinkan penyandang disabilitas mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan bermasyarakat. Rehabilitasi social diberikan dalam bentuk :

1. Rehabilitasi mental spiritual
2. Rehabilitasi medic
3. Rehabilitasi pelatihan
4. Rehabilitasi social

Maksud dari rehabilitasi ini adalah agar penyandang disabilitas agar lebih tegar dalam kondisinya dan dapat mempelajari keterampilan sesuai dengan bakat dan minat yang mereka punya, bukan hanya itu saja dengan rehabilitasi, penyandang disabilitas diberikan bimbingan dan pemahaman sehingga mereka dapat dengan lancar melakukan hubungan komunikasi dan berbaaur dengan masyarakat awam lain.

c) Bantuan social

Bantuan social adalah upaya pemberian bantuan kepada penyandang disabilitas yang tidak mampu dan bersifat tidak tetap, agar mereka dapat meningkatkan kesejahteraan sosialnya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Maksudnya adalah bantuan yang diberikan tiap tahunnya pasti akan berubah, misalnya pada tahun 2015 penyandang disabilitas diberikan bantuan sembako dan uang tunai tiga ratus ribu rupiah, bisa saja pada tahun berikutnya hanya sembako saja yang diberikan tidak beserta uang tunai. Waktu tanggal pemberian bantuan pun dapat berubah ubah bisa saja awal tahun, pertengahan tahun, atau akhir tahun.

3) Pemeliharaan taraf kesejahteraan social

Pemeliharaan taraf kesejahteraan social adalah upaya perlindungan dan pelayanan yang bersifat terus menerus agar penyandang disabilitas dapat mewujudkan taraf hidup yang wajar. Pemeliharaan taraf kesejahteraan social hanya diberikan kepada penyandang disabilitas yang mutlak kehidupannya bergantung pada bantuan orang lain atau tidak bisa ditinggalkan berlama lama tanpa diawasi orang lain. Penyandang disabilitas tersebut harus diberikan perlindungan dan pelayanan oleh keluarga, keluarga pengganti, atau panti social yang merawatnya.

Empat hak bagi penyandang disabilitas diatas merupakan konsep pemerintah daerah provinsi Riau dalam perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas yang tercantum dalam peraturan daerah. Harapannya dengan adanya peraturan daerah ini penyandang disabilitas dapat bangkit dan maju seperti masyarakat awam lainnya serta mandiri dan sejahtera.

2.4 Penelitian Terdahulu

Dalam Penelitian ini, penulis memaparkan beberapa penelitian terdahulu dengan pembahasan yang akan diteliti :



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No	Nama Penelitian	Judul dan Tahun Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Angga Dharma Putra Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau	Analisis Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas di Kota Pekanbaru (2017)	Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Perlindungan dan Pemberdayaan yang dilakukan oleh dinas sosial kota pekanbaru belum berjalan dengan baik. Hal ini dikarenakan ada beberapa hambatan seperti aksesibilitas yang belum dilaksanakan dengan baik, masyarakat hanya beberapa yang mendapatkan bansos, dan jarang adanya sosialisasi yang dilakukan dinas sosial terhadap penyandang disabilitas.
2.	Subailah Hayati Universitas Islam Negeri Sumatra Utara Medan	Peran Dinas Sosial Dalam Pemberdayaan Penyandang Disabilitas di Kota Binjai (2019)	Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Pemberdayaan yang dilakukan oleh dinas sosial kota binjai berjalan dengan baik, namun belum maksimal secara penuh, karena terdapat beberapa fasilitas, bantuan sosial yang terbatas.
3.	Oca Pawalin Universitas Lampung	Peran Dinas Sosial Kota Metro Dalam Pemberdayaan Penyandang Disabilitas (2017)	Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa dalam pemberdayaan penyandang disabilitas telah melaksanakan perannya namun belum maksimal karena melihat dari segi jumlah penerima bantuan dari perannya yaitu peran fasilitatif yang dilaksanakan Dinas Sosial belum merata, dibuktikan dengan pelatihan dan bantuan sosial yang diberikan masih terbelang minim bahkan tidak mencapai 20%

2.5 Pandangan Islam Tentang Pemberdayaan

Dalam perspektif islam, penyandang disabilitas identik dengan istilah dzawil a'har, dzawil ihtiyaj al-khashah atau dzawil a'dzar. Orang-orang yang mempunyai keterbatasan, berkebutuhan khusus, atau mempunyai uzur. Hal ini tertulis dalam Al-Qur'an surah An-Nur ayat 61



2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَالَاتِكُمْ أَوْ مَا مَلَكَتُمْ مَفَاتِحَهُ أَوْ صَدَقْتُمْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبَرَكََةً طَيِّبَةً كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿١١﴾

Artinya :

Tidak ada halangan bagi orang buta, tidak (pula) bagi orang pincang, tidak (pula) bagi orang sakit, dan tidak (pula) bagi dirimu sendiri, makan (bersama-sama mereka) dirumah kamu sendiri atau dirumah bapak-bapakmu, dirumah ibu-ibumu, dirumah saudara-saudaramu yang laki-laki, di rumah saudaramu yang perempuan, dirumah saudara bapakmu yang laki-laki, dirumah saudara bapakmu yang perempuan, dirumah saudara ibumu yang laki-laki, dirumah saudara ibumu yang perempuan, dirumah yang kamu miliki kuncinya atau dirumah kawan-kawanmu. Tidak ada halangan bagi kamu makan bersama-sama mereka atau sendirian. Maka apabila kamu memasuki (suatu rumah dari) rumah-rumah (ini) hendaklah kamu memberi salam kepada (penghuninya yang berarti memberi salam) kepada dirimu sendiri, salam yang ditetapkan dari sisi Allah, yang diberi berkat lagi baik. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayatnya(Nya) bagimu, agar kamu memahaminya.

Tafsir Al-Mukhtashar / Markaz Tafsir Riyadh, di bawah pengawasan

Syaikh Dr. Shalih bin Abdullah bin Humaid (Imam Masjidil Haram)

Tidak ada dosa bagi orang buta yang kehilangan penglihatannya, tidak pula ada dosa bagi orang pincang, dan tidak pula bagi orang sakit; bila meninggalkan kewajiban yang mereka tidak sanggup laksanakan seperti jihad di jalan Allah. Dan tidak ada dosa bagi diri kalian -wahai orang-orang beriman- makan di rumah kalian sendiri, termasuk juga rumah anak laki-laki kalian, atau



2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

makan di rumah bapak-bapak kalian, di rumah ibu-ibu kalian, di rumah saudara laki-laki kalian, di rumah saudara kalian, di rumah saudara laki-laki bapak kalian, di rumah saudara bapak kalian, di rumah saudara laki-laki ibu kalian, di rumah saudara ibu kalian, di rumah yang kalian miliki kuncinya seperti penjaga kebun.

Tidak ada dosa untuk kalian makan di rumah kawan-kawan kalian karena biasanya hal itu terjadi lantaran kerelaannya untuk itu, tidak ada pula dosa bagi kalian makan bersama-sama atau sendirian. Maka apabila kalian memasuki suatu rumah seperti rumah-rumah yang di sebutkan di atas, atau rumah selainnya; hendaklah kalian memberi salam kepada penghuninya dengan mengucapkan, *Assalāmu 'alaikum*", dan apabila di dalamnya tidak terdapat seorang pun penghuninya, maka ucapkanlah salam kepada dirimu sendiri dengan mengucapkan, *"Assalāmu'alainā wa 'alā 'ibādillāhiṣ ṣālihīn"* sebagai ucapan salam dari sisi Allah yang disyariatkan-Nya untuk kalian, yang diberi berkah; karena ia menebarkan sikap saling mencintai, dan persatuan di antara kalian, juga baik karena bisa menenangkan hati pendengarnya. Dengan penjelasan-penjelasan seperti ini yang juga disebutkan sebelumnya dalam surah ini, Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya agar kalian memahaminya, dan mengamalkan kandungannya.

Ayat ini secara eksplisit menegaskan kesetaraan sosial antara penyandang disabilitas dan mereka yang bukan penyandang disabilitas. Mereka harus diperlakukan secara sama dan diterima secara tulus tanpa diskriminasi.

2.6 Definisi Konsep

Pada penelitian ini peneliti mengacu pada teori-teori yang berhubungan dengan fokus dan lokus penelitian, sebagai dasar dan pedoman untuk mengatur sejauh mana pedoman ini sesuai dengan kenyataan dilapangan sehingga akan



- UIN SUSKA RIAU
- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menghasilkan kesimpulan yang objektif. Untuk memudahkan penulisan agar tercapai kesamaan pengertian, maka penulis memberikan batasan konsep sebagai berikut

Peran adalah aspek dinamis dari kedudukan (status) dengan kedudukannya, maka dia telah menjalankan suatu peran (Soekanto)

Pemberdayaan adalah proses, cara, membuat, memberdayakan (KBBI,2008)

Penyandang Disabilitas adalah Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik, mental dan intelektual, atau sensorik secara permanen yang dalam interaksinya dengan berbagai hambatan merintangi partisipasi mereka dalam masyarakat secara penuh dan efektif, berdasarkan pada asas kesetaraan orang lain.

Peraturan daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama kepala daerah.

2.7 Konsep Operasional

Konsep operasional adalah suatu konsep yang diberikan kepada suatu variabel dengan cara memberikan arti/menspesifikasikan kegiatan ataupun memberikan suatu operasional ini diuraikan berdasarkan kata-kata yang tertera pada judul maupun isi.

UIN SUSKA RIAU



Tabel 2.1
Konsep Operasional

Indikator	Sub Indikator
1. Aksesibilitas	1. Menyediakan Aksesibilitas yang berbentuk fisik pada sarana dan prasarana umum, lingkungan, serta prasarana transportasi 2. Menyediakan aksesibilitas yang berbentuk non fisik pada sarana dan prasarana umum serta, lingkungan dan sarana transportasi.
2. Rehabilitasi	1. Memajukan ketersediaan, pengetahuan dan penggunaan alat bantu dan teknologi, didesain bagi penyandang disabilitas, yang terkait dengan rehabilitasi. 2. Melaksanakan rehabilitasi untuk mengoptimalkan dan mengembangkan fungsi fisik, mental dan sosial penyandang disabilitas.
3. Bantuan Sosial	1. Memberikan bantuan materiil 2. Memberikan bantuan finansial 3. Memberikan bantuan fasilitas pelayanan seperti KTP, KK, AKTE, Jaminan Kesehatan dan lainnya 4. Memberikan bantuan informasi
4. Pemeliharaan Taraf Kesejahteraan Sosial	1. Memberikan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial berupa perlindungan dan jaminan sosial agar penyandang disabilitas dapat memperoleh taraf hidup yang wajar 2. Memberikan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial kepada penyandang disabilitas yang derajat disabilitasnya tidak dapat direhabilitas.

Sumber: Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 18 Tahun 2013 Tentang
Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas

Hak dan Perlindungan Penyandang Disabilitas
1. Dilarang merendahkan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



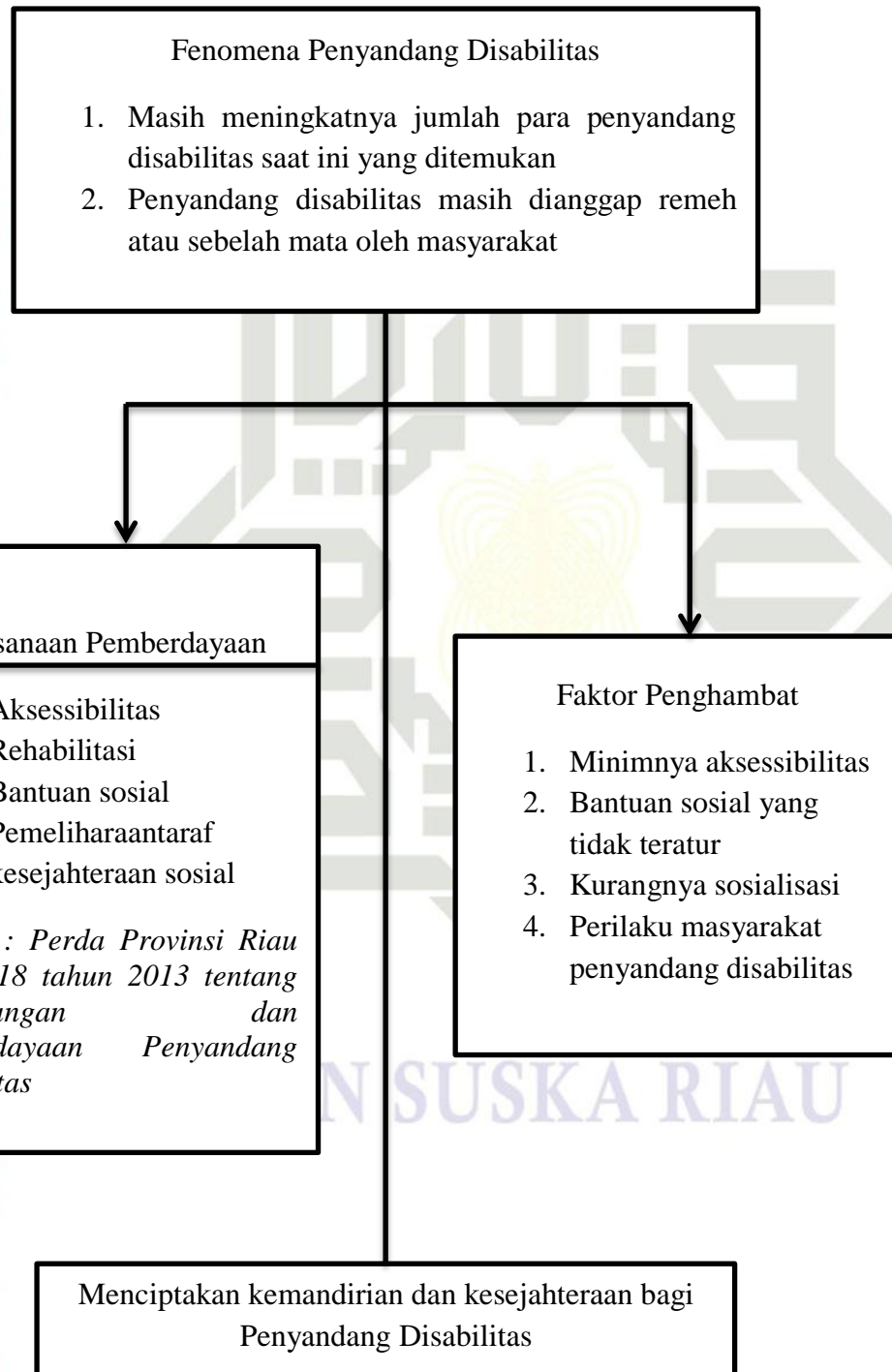
2.8 Kerangka Berfikir

Gambar 2.1
Kerangka Berfikir

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa r
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau



Sultan Syarif Kasim Riau

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

Dalam penelitian ini, lokasi yang menjadi tempat penelitian adalah Kantor Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru yang terletak di Jalan Datuk Setia Maharaja No.6, Simpang Tiga, Kec. Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Riau 28289. Adapun penelitian ini dilakukan mulai bulan Agustus-Oktober 2020.

3.2 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian Deskriptif. Analisis Deskriptif merupakan analisis yang banyak digunakan untuk mengkaji satu variable atau variable mandiri. (Harbani Pasolong:2012:189)

Adapun jenis penelitian yang dilakukan yaitu penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan metode penelitian dengan cara mendeskripsikan secara langsung denomena yang terjadi pada objek penelitian.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Sumber data utama pada penelitian kualitatif yaitu berupa kat-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti data tertulis. Data penelitian dikumpulkan sesuai dengan rancangan penelitian yang telah dilakukan. Data tersebut diperoleh dengan jalan percobaan atau pengukuran gejala yang diteliti. Data yang dikumpulkan merupakan pernyataan fakta mengenai obyek yang diteliti (Beni Kurniawan, 2012:31).



3.3.1. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden di lapangan, dengan melakukan wawancara dengan beberapa pegawai ataupun dengan melakukan penyebaran angket. Sumber data, primer diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian yaitu Dinas Sosial Kota Pekanbaru.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui instansi pemerintahan yang erat kaitannya dengan penelitian, berupa dokumen-dokumen, dokumentasi dan lain-lain sebagai bukti bahwa penelitian ini benar dilakukan.

3.4 Informan Penelitian

Informan adalah subjek yang memberikan data berupa informasi kepada peneliti. Dalam penelitian ini, peneliti memilih *key informan* dan informasi yang peneliti anggap mengetahui tentang permasalahan penelitian. Sebagai *key informan* yang paling mengetahui bagaimana Peran Dinas Sosial Dalam Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Di Kota Pekanbaru.

Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini meliputi :

No	Informan	Orang
1	Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial	1
2	Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas	1
3	Penyandang Disabilitas	2
Jumlah		4



Adapun yang peneliti jadikan *key informan* adalah *subject* ataupun

individu serta lembaga yang peneliti anggap mampu mengetahui permasalahan

ini. Ciri-cirinya antara lain:

Berada di daerah yang diteliti

Mengetahui kejadian/permasalahan

Bisa berargumentasi dengan baik

Terlibat langsung dalam permasalahan.

2.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa

metode berikut :

Wawancara

Wawancara ialah proses komunikasi atau interaksi untuk mengumpulkan informasi dengan cara Tanya jawab antara peneliti dengan informan atau subjek penelitian. Dalam prosedur pengumpulan data menurut John W. Creswell (2016:254) menjelaskan, peneliti dapat melakukan *face to face interview* (wawancara berhadap-hadapan) dengan informan atau subjek penelitian, melalui media telekomunikasi, atau terlibat dalam *focus group interview* (wawancara dalam kelompok tertentu). Peneliti dapat mengadakan wawancara mendalam dengan *key informan* guna memperoleh data dan memahami bagaimana peran yang dilakukan pada Dinas Sosial terhadap penyandang disabilitas.

2. Observasi

Observasi yaitu pengamatan secara langsung dengan sistematis yang bertujuan mengenali berbagai rupa kejadian, peristiwa, keadaan dan tindakan

Hal ini dapat dihindari dengan cara sebagai berikut:

1. Dilakukan dengan cara yang benar dan jujur.
2. Dilakukan dengan cara yang benar dan jujur.
3. Dilakukan dengan cara yang benar dan jujur.
4. Dilakukan dengan cara yang benar dan jujur.
5. Dilakukan dengan cara yang benar dan jujur.
6. Dilakukan dengan cara yang benar dan jujur.
7. Dilakukan dengan cara yang benar dan jujur.
8. Dilakukan dengan cara yang benar dan jujur.
9. Dilakukan dengan cara yang benar dan jujur.
10. Dilakukan dengan cara yang benar dan jujur.



terhadap gejala-gejala yang hendak diteliti. Harbani Pasolong (2012:137).

Menurut Bungin (2007:115-117) terdapat beberapa bentuk observasi, yaitu observasi partisipasi, observasi tidak terstruktur dan observasi kelompok.

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan observasi tidak terstruktur karena teknik ini dilakukan dengan cara pengamatan secara langsung maupun tidak langsung berdasarkan perkembangan yang terjadi pada Dinas Sosial Kota Pekanbaru.

Dokumentasi

Pengumpulan data melalui buku-buku, photo, arsip ataupun studi literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Dokumentasi dalam penelitian ini diperoleh dari Dinas Sosial Kota Pekanbaru, buku-buku, photo, arsip ataupun literatur-literatur lainnya yang berkaitan dengan judul penelitian.

1.6 Teknik Analisa Data

Analisis data merupakan proses pengelolaan, penyajian, interpretasi dan analisis data yang diperoleh dari lapangan dengan tujuan agar data yang disajikan mempunyai makna, sehingga pembaca dapat mengetahui hasil penelitian.

Bogdan menyatakan bahwa analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam unit-unit penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain (Sugiyono, 2014:244)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Metode ini menggunakan metode kualitatif, sedangkan pendekatannya yang digunakan adalah pendekatan deskriptif. Pendekatan deskriptif yaitu analisis yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data, mengelola data kemudian menyajikan data observasi agar agar pihak lain dapat mudah memperoleh gambaran mengenai objek yang diteliti.

Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting. Data yang sudah direduksi dapat memberikan gambaran yang tepat, dan dapat membantu peneliti dalam pengumpulan data. Data yang diperoleh dari wawancara dan observasi akan difokuskan pada Dinas Sosial kota Pekanbaru dalam Pemberdayaan Penyandang Disabilitas.

Penyajian data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat deskriptif. Informasi yang di dapat di lapangan disajikan kedalam teks dengan sebaik-baik mungkin, tanpa adanya penambahan yang tidak disesuaikan dengan fakta yang ada. Hal tersebut bertujuan untuk dapat menyajikan data yang telah direduksi dengan tepat dan benar dengan keadaan yang sebenarnya di lapangan. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, peneliti berusaha menyajikan data yang tepat dan akurat terkait dengan Peran Dinas Sosial Dalam Pemberdayaan Penyandang Disabilitas di Kota Pekanbaru.

2. Penyajian Data

Dalam penelitian kualitatif penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan,, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sebagainya.



UIN SUSKA RIAU

Hal yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa saja yang akan terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Dengan demikian kesimpulan pada penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Gambaran Umum Kota Pekanbaru

4.1.1 Sejarah Dinas Sosial Kota Pekanbaru

Berdirinya Dinas Sosial Kota Pekanbaru sesudah Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, bukan berarti Indonesia sudah merdeka sepenuhnya, karena bangsa Indonesia masih merasa aman dari penjajah. Belanda tidak ingin melepas begitu saja jajahannya meski Indonesia sudah memproklamasikan kemerdekaannya. Dengan maksud ingin menjajah kembali Indonesia, maka Belanda dengan kekuatan penuh masuk ke Indonesia dan berniat memasukkan tempurnya kembali ingin menguasai Indonesia. Terjadilah pertempuran yang sangat sengit antara dua bangsa yang berbeda tujuan dan keinginan. Di dalam pertempuran ini banyak terjadi kekacauan, sehingga banyak rakyat-rakyat yang mengungsi, oleh pejuang yang berada digaris belakang maka dikoordinirilah para relawan yang membantu para pejuang dan pengungsi ini.

Lugas para relawan yaitu membuat dapur umum, menyuplai makanan dan logistik serta pekerjaan lainnya yang dibutuhkan pada saat itu. Dampak peristiwa ini menumbuhkan perasaan hubungan yang emosional dan persaudaraan yang kental antara pejuang, pengungsi, relawan dan orang-orang yang terlibat dalam peristiwa pertempuran tersebut. Peristiwa ini kemudian disebut sebagai Hari Kesetiakawanan Sosial yang jatuh pada tanggal 22 Desember 1947 yang menjadi cikal bakal lahirnya Departemen Sosial.

Hingga saat ini pemerintah Negara Republik Indonesia setiap pada tanggal 22 Desember diperingati sebagai Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional (HKSAN)



2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau hari jadi Departemen Sosial. Pada Tahun 1948 Pemerintah Negara Republik Indonesia yang baru berdiri dan sedang dilanda perang merasakan perlunya suatu instansi yang resmi dikelola oleh pemerintah dalam rangka membantu peperangan, maka pada tahun itu dibentuklah yang namanya Inspeksi Sosial mulai dari pusat sampai ke daerah-daerah yang tugas pokoknya adalah membantu tentara Republik Indonesia dalam peperangan.

Kemudian pada Tahun 1950 Inspeksi Sosial ditukar sebutannya menjadi Jawatan Sosial tugas pokoknya yaitu membantu korban perang dan para veteran pejuang. Lalu Tahun 1965 Jawatan Sosial yang tugas utamanya membantu para korban perang dan veteran pejuang ditambah tugas pokoknya dengan membantu para penyandang cacat (paca).

Tenaga Kerja Indonesia, dan Organisasi Sosial (orsos). Pada Tahun 1974 Jawatan Sosial diganti nama menjadi Departemen Sosial Republik Indonesia untuk tingkat pusat yang dikepalai oleh seorang Menteri Republik Indonesia, tingkat provinsi disebut Kantor Wilayah (Kanwil) Departemen Sosial Provinsi dikepalai oleh seorang kepala departemen, sementara untuk tingkat kabupaten/kota disebut Kantor Departemen Sosial Kabupaten/Kota, ditingkat Kecamatan disebut Petugas Sosial Kecamatan yang bertempat di kantor camat.

Tugas utama dari Departemen Sosial adalah perintis pejuang kemerdekaan, mengangkat pahlawan nasional, penyandang cacat, karang taruna, panti asuhan, fakir miskin, korban bencana, lembaga sosial, organisasi sosial, korban tindak kekerasan dalam rumah tangga, korban perdagangan anak, gelandangan dan pengemis, pekerja seks komersil (PSK), korban HIV/AIDS, korban narkoba, komunitas adat terpencil. Pada tahun 1998, Departemen Sosial



2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pernah dibubarkan oleh Presiden Republik Indonesia yang pada saat itu dijabat KH. Abdurrahman Wahid atau Gusdur dengan alasan yang tidak jelas. Pada tahun 1999, dihidupkan kembali Departemen Sosial dengan berganti nama menjadi Badan Kesejahteraan Sosial Nasional (BKSNI) untuk tingkat pusat.

Kemudian pada Tahun 2000 diganti kembali dengan nama Departemen Sosial dan Kesehatan Republik Indonesia. Lalu pada Tahun 2001 Departemen Sosial Republik Indonesia dihidupkan kembali oleh Presiden yang pada waktu itu dijabat oleh Megawati Soekarno Putri. Pada tahun itu juga untuk Kota Pekanbaru sesuai dengan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas, maka terbentuklah Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Daerah Kota Nomor 7 Tahun 2001.

Pada Tahun 2008 Pemerintah Kota Pekanbaru mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Struktur dan Tata Kerja yang baru untuk Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru. Kedudukan Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru adalah unsur pelaksana pemerintah daerah dibidang Kesejahteraan Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru yang pada saat ini dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dan terdiri dari 1 sekretaris dan 4 Kepala Bidang (Kabid), 15 Kepala Seksi (Kasi) dan tenaga jabatan fungsional dengan jumlah personil 59 orang yang dilatar belakangi dari berbagai disiplin ilmu yang berbeda, dalam pelaksanaan sehari-hari berada di bawah tanggung jawab Walikota melalui Sekretaris Kota Pekanbaru.

Kedudukan Dinas Sosial dan Pemakaman sesuai dengan tuntutan Undang-Undang Otonomi Daerah Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dimana



Kabupaten/Kota diberikan wewenang yang luas baik dalam urusan pemerintahan maupun dalam pengelolaan pembangunan.

Kewenangan yang luas ini disatu sisi dapat dipandang sebagai kesempatan bagi daerah untuk berkembang dan berbuat sendiri demi kemajuan suatu daerah tersebut, dan disisi lain merupakan tantangan baru yang cukup berat dan menantang. Kemudian untuk menunjang pelaksanaan pelayanan penyediaan tempat pemakaman umum di Kota Pekanbaru, maka oleh pemerintah Kota Pekanbaru pada Tahun 2004 dibangunlah 6 (enam) tempat pemakaman umum yang tersebar di sekitar Kota Pekanbaru yang tata kelolanya diatur dan ditangani oleh Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru.

1.1.2 Visi dan Misi Dinas Sosial Kota Pekanbaru

Setiap organisasi atau instansi pemerintah harus memiliki pencapaian yang maju untuk ke depannya dalam mengatasi dan melakukan pekerjaannya dalam artian adanya visi dan misi, agar apa yang dilaksanakan terstruktur, strategis dan tetap pada pedoman yang telah ditentukan. Penetapan visi menjadi bagian dari perencanaan strategik, yang merupakan langkah penting dalam sebuah organisasi.

Visi dari Dinas Sosial Kota Pekanbaru yaitu “Terwujudnya Kesejahteraan Sosial bagi PMKS/PSKS dilandasi kesetiakawanan sosial serta pemakaman yang indah dan tertib”. Dari Visi diatas, dapat dirumuskan Misi dari Dinas Sosial Kota Pekanbaru yaitu:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan sarana kerja
2. Meningkatkan dan memberdayakan PMKS dan PSKS agar tumbuh dan berkembang dalam sistem masyarakat



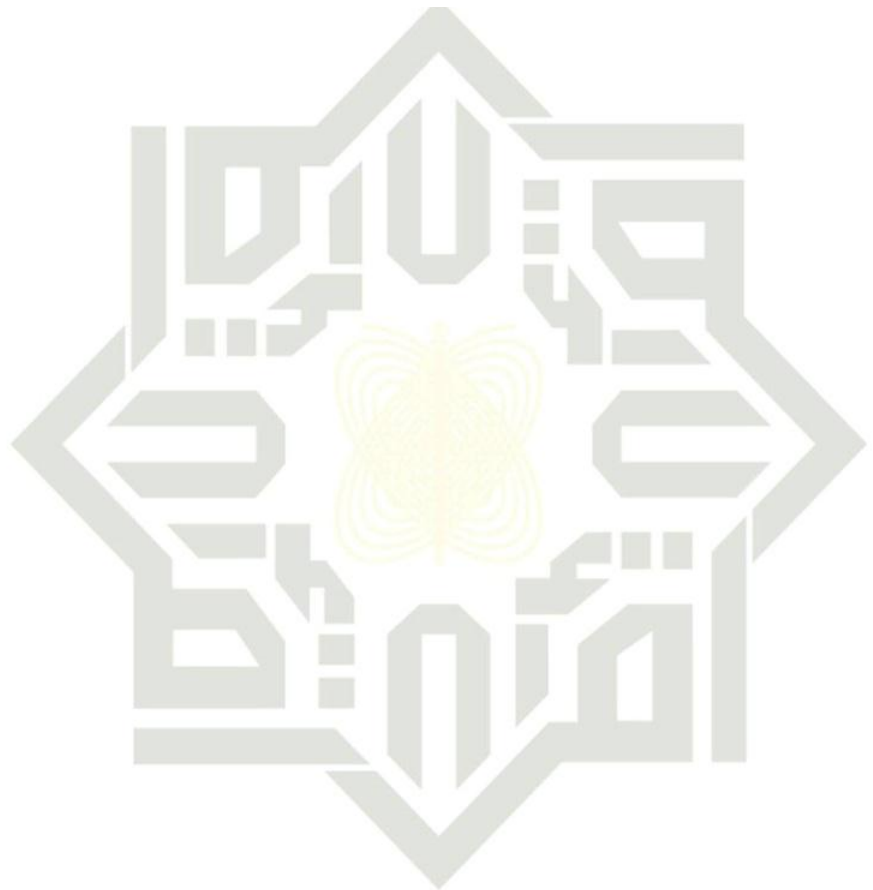
Peraturan UIN Suska Riau
Peraturan UIN Suska Riau
Peraturan UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Meningkatkan keterampilan dan produktivitas tenaga kerja PMKS dan PSKS
4. Meningkatkan pelayanan sosial kepada masyarakat secara optimal melalui Pekerjaan Sosial Masyarakat (PSM)
5. Menciptakan lapangan kerja melalui kerjasama dengan dunia usaha.

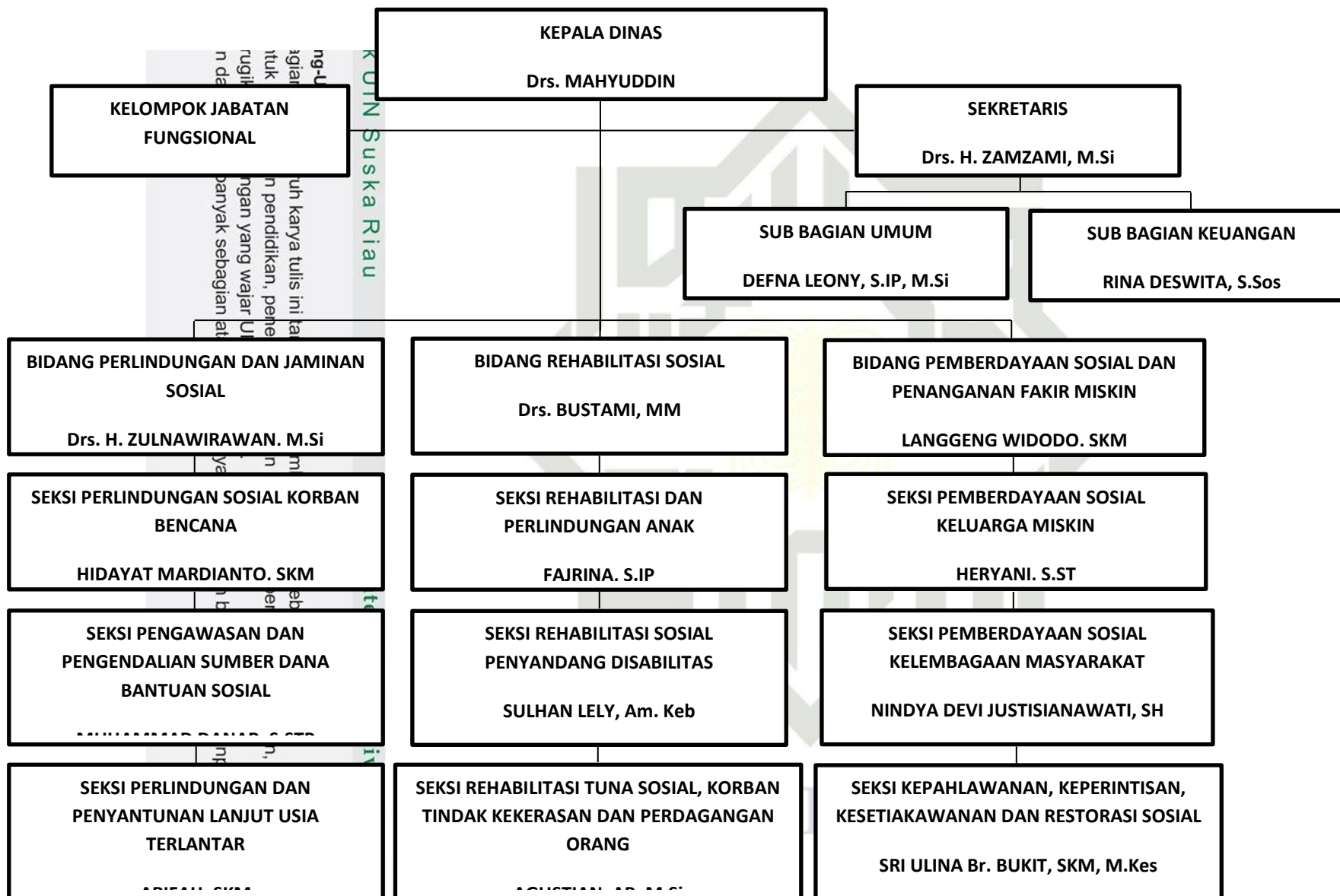
UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

4.1.3 Struktur/Bagan Susunan Organisasi Dinas Sosial Kota Pekanbaru





Handicapped Bilangan 1. Mencegah mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 97 Tahun 2016 tentang Celudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kota Pekanbaru memiliki tugas pokok dan fungsi untuk membantu Walikota melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Sosial. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 97 Tahun 2016 tentang Celudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kota Pekanbaru menjelaskan mengenai susunan organisasi Dinas Sosial Kota Pekanbaru yaitu:

- a) Kepala Dinas Sosial Kota Pekanbaru.
- b) Sekretaris, membawahi:
 1. Sub Bagian Umum.
 2. Sub Bagian Keuangan.
- c) Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, meliputi:
 1. Seksi Perlindungan dan Korban Bencana..
 - Seksi Pengawasan dan Pengendalian Sumber Dana Bantuan Sosial.
 - Seksi Perlindungan dan Penyantunan Lanjut Usia Terlantar.
- d) Bidang Rehabilitasi Sosial, meliputi:
 - Seksi Rehabilitasi Sosial dan Perlindungan anak.
 - Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas.
 - Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial, Korban Tindak Kekerasan dan Perdagangan Orang.
- e) Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin, meliputi:
 - Seksi Pemberdayaan Sosial Keluarga Miskin.
 - Seksi Pemberdayaan Sosial Kelembagaan Masyarakat.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Seksi Kepahlawanan, Keberintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial.

Unit Pelaksana Teknis.

Kelompok Jabatan Fungsional.

Tugas dan Fungsi:

Kepala Dinas Sosial Kota Pekanbaru memiliki tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan dibidang sosial. Tugas Kepala Dinas melaksanakan fungsi, antara lain:

Merumuskan kebijakan teknis dalam bidang sosial.

2. Melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang sosial.

3. Pembinaan dan penyelenggaraan urusan bidang sosial.

4. Pembinaan dan penyelenggaraan tugas bidang sosial.

5. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis.

Melaksanakan urusan penatausahaan dinas.

Melaksanakan tugas lain yang diserahkan oleh Walikota sesuai tugas pokok dan fungsinya.

b) Bidang Rehabilitasi Sosial; memiliki tugas untuk membantu sebagian tugas Kepala Dinas dalam melakukan sub urusan rehabilitasi sosial.

Bidang rehabilitasi sosial melaksanakan fungsi:

Melakukan koordinasi, pembinaan serta melaksanakan penyiapan bimbingan di bidang Rehabilitasi Sosial.

Melakukan koordinasi, melaksanakan pembinaan lanjut, pelayanan sosial bagi lanjut usia terlantar, pemberdayaan dan rehabilitasi sosial



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

bagi penyandang disabilitas, pelayanan perlindungan dan rehabilitasi sosial anak terlantar, anak bermasalah dengan hukum, anak korban tindak kekerasan, anak jalanan, balita terlantar, korban napza, bekas hukuman dan tuna sosial, kaum minoritas, penyandang psikotik.

Melakukan koordinasi, menyusun hasil-hasil laporan yang akan dicapai dalam melaksanakan tugas.

Melakukan koordinasi, serta pemberian petunjuk teknis pelaksanaan tugas kepada bawahan.

Melakukan koordinasi, melaksanakan tugas lain atas arahan pimpinan.

6. Melakukan koordinasi rencana kegiatan bidang masing-masing.

7. Melakukan tugas lain-lain yang diserahkan oleh pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Bidang Rehabilitasi Sosial terdiri dari:

a. Seksi Rehabilitasi Sosial dan Perlindungan Anak, memiliki fungsi:

1. Merumuskan, penyiapan bahan dan peralatan kerja dengan merinci jenis dan jumlah peralatan kerja yang diperlukan di tempat kerja.
2. Merumuskan, melaksanakan penyusunan rencana kerja dengan cara merinci dan menjadwalkan kegiatan yang akan dilaksanakan.
3. Merumuskan dan melaksanakan pendataan kepada anak.
4. Merumuskan dan monitoring evaluasi melaksanakan tugas agar dapat diketahui hasil yang dicapai dari kegiatan yang dilaksanakan, sudah atau belum dengan rencana kerja dan tolak ukur keberhasilan tugas yang sudah dibuat.
5. Merumuskan dan melakukan penyiapan bahan yang diperlukan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

oleh Kepala Bidang untuk penyusunan kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk teknis perlindungan dan rehabilitasi sosial anak bermasalah dengan hukum, anak korban tindak kekerasan/diperlakukan salah, anak jalanan, anak terlantar, balita terlantar, anak berkebutuhan khusus (selain anak disabilitas).

6. Merumuskan, dan melaksanakan peningkatan perlindungan serta pelayanan rehabilitasi sosial anak terlantar, bayi terlantar, anak jalanan baik melalui pelayanan dalam panti maupun luar panti.
7. Merumuskan dan perluasan jangkauan pelayanan serta perlindungan sosial bayi/anak melalui pengangkatan anak (adopsi).
8. Merumuskan, melaksanakan peningkatan pelayanan kesejahteraan anak baik dalam panti maupun luar panti dengan memberikan bantuan belajar dan pendekatan gizi.
9. Merumuskan dan pembinaan kesejahteraan anak termasuk balita melalui panti sosial, kelompok bermain dan penitipan anak.
10. Merumuskan, melaksanakan penyiapan rekomendasi pengangkatan anak/adopsi.
11. Merumuskan dan peningkatan usaha-usaha ke arah yang dapat mengoptimalkan melaksanakan kegiatan yang ada di bidangnya.
12. Merumuskan dan pengendalian, pengawasan dan pembinaan kepada semua upaya kegiatan di bidangnya.
13. Merumuskan dan menyusun laporan kegiatan di bidangnya dengan cara mempersiapkan kebijaksanaan yang diambil dalam pemecahan masalah.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

14. Melaksanakan tugas lain-lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas; memiliki tugas membantu Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial dalam melaksanakan sub urusan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas. Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas menyelenggarakan fungsi:

1. Merumuskan, menyiapkan bahan dan peralatan kerja dengan cara merinci jenis dan jumlah peralatan kerja yang diperlukan di tempat kerja agar mudah diuntukkan.
2. Merumuskan dan menyusun rencana kerja dengan merinci dan menjadwalkan kegiatan yang akan dilaksanakan.
3. Merumuskan dan evaluasi melaksanakan tugas agar dapat diketahui hasil yang dicapai dari kegiatan yang dilaksanakan, sudah atau belum dengan rencana kerja dan tolak ukur keberhasilan tugas yang sudah dibuat.
4. Merumuskan dan melaksanakan penyiapan bahan-bahan yang diperlukan oleh Kepala Bidang untuk menyusun kebijaksanaan, program dan prosedur kerja, petunjuk teknis, pencatatan hasil kerja dan laporan di bidangnya.
5. Merumuskan, melakukan inventarisasi, serta melakukan identifikasi data penyandang disabilitas.
6. Merumuskan, melakukan rehabilitasi sosial serta pemberdayaan penyandang disabilitas.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

7. Merumuskan, melaksanakan penyiapan pembinaan, bimbingan dan konsultasi teknis kepada penyandang disabilitas.
8. Merumuskan, melakukan penyiapan bahan pembinaan lanjut dan pelayanan sosial bagi penyandang disabilitas.
9. Merumuskan dan melakukan pengiriman penyandang disabilitas ke pusat rehabilitasi sosial/panti sesuai dengan kedisabilitasannya.
10. Merumuskan dan melakukan pemberian alat bantu penyandang disabilitas sesuai dengan kedisabilitasannya.
11. Merumuskan dan peningkatan pelayanan pada sarana Loka Bina Karya (LBK).
12. Merumuskan dan pembinaan kelompok usaha bersama penyandang disabilitas.
13. Pengendalian, pengawasan, pembinaan dan pemberdayaan kepada semua upaya kegiatan yang dilaksanakan di bidangnya.
14. Merumuskan dan penyusunan laporan di bidangnya dengan cara mempersiapkan bahan yang akan dilaporkan, masalah yang dihadapi dan langkah kebijaksanaan yang diambil dalam pemecahan masalah.
15. Melaksanakan tugas lain-lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial, Korban Tindak Kekerasan dan Perdagangan Orang; memiliki tugas membantu Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial dalam melaksanakan sub urusan rehabilitasi tuna sosial, korban tindak kekerasan dan perdagangan orang. Seksi

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rehabilitasi Tuna Sosial, Korban Tindak Kekerasan dan Perdagangan Orang menyelenggarakan fungsi:

1. Merumuskan, penyiapan bahan dan peralatan kerja dengan merinci jenis dan jumlah peralatan kerja yang diperlukan di tempat kerja agar mudah diuntukkan.
2. Merumuskan dan menyusun rencana kerja dengan merinci serta menjadwalkan kegiatan yang akan dilaksanakan.
3. Merumuskan dan evaluasi melaksanakan tugas agar dapat diketahui hasil yang dicapai dari kegiatan yang dilaksanakan, sudah atau belum dengan rencana kerja dan tolak ukur keberhasilan tugas yang sudah dibuat.
4. Merumuskan dan penyiapan bahan-bahan yang diperlukan oleh Kepala Bidang untuk menyusun kebijaksanaan, program dan prosedur kerja, petunjuk teknis, pencatatan hasil kerja dan laporan di bidangnya.
5. Merumuskan dan inventarisasi, identifikasi data penyandang tuna sosial eks Wanita Tuna Susila (WTS), gelandangan dan pengemis, gelandangan psikotik, bekas napi, kaum minoritas, korban tindak kekerasan, pekerja migran dan perdagangan orang.
6. Merumuskan, melaksanakan pencegahan, penertiban bekerjasama dengan pihak terkait dan rehabilitasi sosial pada penyandang tuna sosial eks Wanita Tuna Sosial (WTS), gelandangan dan pengemis, gelandangan psikotik).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

7. Merumuskan dan melaksanakan penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, konsultasi teknis dan rehabilitasi sosial penyandang tuna sosial eks Wanita Tuna Sosial (WTS), gelandangan dan pengemis, gelandangan psikotik, bekas napi, kaum minoritas, korban tindak kekerasan, pekerja migran dan perdagangan orang.
8. Merumuskan dan pembinaan lanjut dan pelayanan perlindungan dan rehabilitasi sosial bagi penyandang tuna sosial, korban tindak kekerasan, pekerja migran, perdagangan orang serta orang dengan HIV/AIDS (ODHA).
9. Merumuskan dan evaluasi melaksanakan tugas agar dapat diketahui hasil yang dicapai dari kegiatan yang dilaksanakan, sudah atau belum dengan rencana kerja dan tolak ukur keberhasilan yang telah dibuat.
10. Merumuskan dan peningkatan usaha-usaha ke arah yang dapat mengoptimalkan melaksanakan kegiatan di bidangnya.
11. Merumuskan, dan melaksanakan pengendalian, pengawasan serta pembinaan kepada semua upaya kegiatan yang dilaksanakan di bidangnya.
12. Merumuskan dan pembuatan laporan di bidangnya dengan cara mempersiapkan bahan yang akan dilaporkan, masalah yang dihadapi dan langkah kebijaksanaan yang diambil dalam pemecahan masalah.
13. Melakukan tugas lain-lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB VI

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang Peran Dinas Sosial dalam Pemberdayaan Penyandang Disabilitas di Kota Pekanbaru, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut

1. Dilarang menyalin atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan terhadap Peran Dinas Sosial dalam Pemberdayaan Penyandang Disabilitas di Kota Pekanbaru dapat dikatakan belum maksimal, hanya saja belum maksimal dikarenakan masih banyak fasilitas sarana dan prasarana serta pelayanan umum yang belum memberikan kemudahan bagi penyandang disabilitas, dan kurangnya keseriusan dari kemensos dalam menyalurkan bantuan ke dinas sosial kota pekanbaru sehingga dari kemensos ke dinas sosial kota pekanbaru ke penyandang disabilitas belum maksimal dalam memberikan bantuan kepada para penyandang disabilitas.
2. Adapun hambatan-hambatan yang ada dalam pemberdayaan penyandang disabilitas yaitu seperti : Pertama, minimnya aksesibilitas bagi para Penyandang Disabilitas, aksesibilitas fisik dan non fisik bagi penyandang disabilitas di Kota Pekanbaru memang masih kurang bahkan hampir jarang ditemukan. Kedua, bantuan sosial yang tidak menentu, bantuan yang diberikan tidak merata dan menentu untuk waktu yang tidak ditentukan. Ketiga, sosialisasi minimnya penyuluhan maupun sosial yang diberikan kepada para penyandang disabilitas sehingga mereka kurang



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau tidak mendapatkan informasi yang diberikan. Keempat, perilaku masyarakat penyandang disabilitas, sikap kurang percaya diri bagi para penyandang disabilitas, adapun penyebabnya bisa karena kurangnya dorongan motivasi yang diberikan sehingga masih merasa minder jika mereka melakukan suatu kegiatan yang nantinya bermanfaat juga untuk mereka.

2.2. Saran

Adapun saran penulis mengenai peran dinas sosial dalam pemberdayaan penyandang disabilitas di kota pekanbaru adalah sebagai berikut :

1. Dilihat dari visi misi kantor yaitu menjadikan dinas sosial kota pekanbaru sebagai lembaga pemberdayaan penyandang disabilitas di kota pekanbaru. Maka dari itu peran dinas sosial dalam pemberdayaan penyandang disabilitas perlu untuk ditingkatkan demi tercapainya visi misi yang telah ditetapkan.
2. Pimpinan hendaknya harap memperhatikan para penyandang disabilitas terutama yang belum terdata dan masih perlu mendapatkan bantuan.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Surah An-Nur ayat 61

Buku

1. Sugeng, M. Burhan. 2007. *Penelitian Kualitatif : Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group
2. Irfan dan Frank Tesoriero. 2008. *Community Development*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008
3. Masolong, Harbani. 2012. *Metode Penelitian Administrasi Publik*. Bandung : Alfabeta
4. Soeharto. 2005. *Analisis Kebijakan Publik*. PT Alfabeta. Bandung
5. Soekanto, Soejono. 1997. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Yayasan Penerbit UI
6. Sugiono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta
7. Sugiono. 2015. *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif Kualitatif dan R&D* : Yogyakarta : Pinus Bool Publisher
8. Sugiono. 2018. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif Kualitatif dan R&D* : Bandung : Alfabeta

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1998 Tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat.
2. PERDA Provinsi Riau Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial

SKRIPSI/JURNAL

1. Agnesia Allensky. *Implementasi Perda Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Di Pekanbaru (Studi Kasus Penyediaan Aksesibilitas Bidang Sarana Dan Prasarana Transportasi)*. Fisip. Vol.4 No. 1



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Alda Nurhaliza Rizqia dan Hartuti Purnaweni. *Pemberdayaan Penyandang Disabilitas di Kota Tangerang Selatan*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

Susanto dan Heylen Amildha Yanuarita. *Pemberdayaan Penyandang Disabilitas oleh Dinas Sosial Kota Kediri*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Vol. 5 No. 4

Sakimah, Slamet Muchsin, Suyeno. *Implementasi Peraturan Daerah Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas (Studi Pada Rehabilitasi Sosial Disabilitas Kota Malang)*. Fakultas Ilmu Administrasi. Vol. 14 No. 3

Krisnada dan Sugeng Widodo. *Pemberdayaan Penyandang Disabilitas oleh Dinas Sosial Kota Kediri*. Fakultas Sosial dan Politik. Vol 3 No.1

Syobah. *Pemberdayaan Penyandang Disabilitas di Provinsi Kalimantan Timur*. Institut Agama Islam Negeri Samarinda. Vol. 15. No. 2

Iyafrites Indrion, Zaili Rusli, dan Febri Yuliani. *Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Di Kota Pekanbaru*. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Vol. 1 No 2

Theresia Baturangka, J.E Kaawoan, dan Frans Singko. *Peran Dinas Sosial Kota Manado Dalam Pemberdayaan Masyarakat Penyandang Disabilitas*. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Vol. 3 No.3

Utami Dewi. *Implementasi Kebijakan Kuota bagi Penyandang Disabilitas untuk Mendapatkan Pekerjaan di Kota Yogyakarta*. Fakultas Ilmu Sosial. Vol 3 No. 2

Jakobus N. Lalapraing. *Pemberdayaan bagi Penyandang Disabilitas*. Yayasan Bahtera.

PEDOMAN WAWANCARA

NAMA : RIFA'I ROFIQ

NIM : 11770513229

Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas

1. Bagaimanakah bentuk aksesibilitas di Kantor Dinas Sosial terhadap penyandang disabilitas ?
2. Apa-apa saja bentuk kemudahan akses bagi penyandang disabilitas di tempat umum yang sudah diberikan ?
3. Apakah ada bentuk-bentuk pelatihan yang diberikan kepada para penyandang disabilitas ? jika ada seperti bentuk pelatihan yang diberikan
4. Bagaimana jika bantuan yang diberikan kepada para penyandang disabilitas, bantuan sosial seperti apa yang diberikan ?
5. Untuk bantuan yang diberikan, para penyandang disabilitas itu datang sendiri, atau pihak Dinas Sosial yang mendata langsung ?
6. Apakah ada bentuk perlindungan yang diberikan oleh Dinas Sosial kepada para penyandang disabilitas ?

Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial

1. Bagaimanakah bentuk aksesibilitas di Kantor Dinas Sosial terhadap penyandang disabilitas ?
2. Apa-apa saja bentuk kemudahan akses bagi penyandang disabilitas di tempat umum yang sudah diberikan ?
3. Apakah ada bentuk-bentuk pelatihan yang diberikan kepada para penyandang disabilitas ? jika ada seperti bentuk pelatihan yang diberikan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Bagaimana jika bantuan yang diberikan kepada para penyandang disabilitas, bantuan sosial seperti apa yang diberikan ?
5. Untuk bantuan yang diberikan, para penyandang disabilitas itu datang sendiri, atau pihak Dinas Sosial yang mendata langsung ?
6. Apakah ada bentuk perlindungan yang diberikan oleh Dinas Sosial kepada para penyandang disabilitas ?

Penyandang Disabilitas

1. Menurut Bapak/Ibuk bagaimana dalam hal akses untuk sarana dan prasarana umum apakah ada yang diberikan khusus bagi para penyandang disabilitas ?
2. Apakah ada diprioritas antara para penyandang disabilitas dan masyarakat umum biasa dalam hal aksesibilitas umum ?
3. Apa ada Bapak/Ibuk mendapatkan suatu pelatihan yang diberikan para penyandang disabilitas, agar para penyandang disabilitas dapat lebih maju
4. Apakah ada bantuan- bantuan yang diberikan Dinas Sosial kepada para penyandang disabilitas ? jika ada seperti apa bantuan tersebut
5. Untuk mendaftarkan ke Dinas Sosial Bapak/Ibuk datang langsung ke Dinas Sosial atau mereka yang datang untuk mendata ?
6. Untuk bantuan yang diberikan apakah rutin diberikan ?

DOKUMENTASI

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan Bidang Rehabilitasi Sosial
(Bapak Drs. Bustami, Mm)



Wawancara dengan Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas
(Ibuk Sulhan Lely, Am. Keb)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan staf Kassi Rehabilitasi



Wawancara dengan pegawai Dinas Sosial Kota Pekanbaru

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan masyarakat penyandang disabilitas



Wawancara dengan masyarakat penyandang disabilitas



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية

FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail : fekonosos@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.VII/PP.00.9/4143/2020
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : **Pra Riset**

Pekanbaru, 03 Desember 2020 M
17 Rabiul Akhir 1442 H

Kepada
Yth. Kepala Kantor
Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Riau
di tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

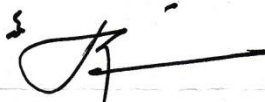
Dengan hormat, disampaikan bahwa salah seorang Mahasiswa Fakultas
Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : Rifa'i Rofiq
NIM. : 11770513229
Jurusan : Administrasi Negara
Semester : VII (Tujuh)

bermaksud mengadakan **Pra Riset** dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul:
"Peran Dinas Sosial Dalam Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Di Kota Pekanbaru" Untuk itu kami mohon kiranya Saudara berkenan memberikan bantuan yang diperlukan kepada mahasiswa tersebut.

Demikianlah, atas bantuan dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

Dekan,


Dr. Drs. H. Muh. Said HM, M.Ag, MM
NIP. 19620512 198903 1 003

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية

FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051
 Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail : fekonsos@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.VII/PP.00.9/2905/2021
 Sifat : Biasa
 Lampiran : -
 Hal : **Izin Riset**

Pekanbaru, 10 Juni 2021 M
 29 Syawwal 1442 H

Kepada
 Yth. Kepala Kantor
 Dinas Penanaman Modal dan
 Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Provinsi Riau
 di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa salah seorang Mahasiswa Fakultas
 Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : Rifa'i Rofiq
 NIM. : 11770513229
 Jurusan : Administrasi Negara
 Semester : VIII (Delapan)

bermaksud mengadakan **Riset** dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul:
**"Peran Dinas Sosial Dalam Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Di Kota
 Pekanbaru"** Untuk itu kami mohon kiranya Saudara berkenan memberikan
 bantuan yang diperlukan kepada mahasiswa tersebut.

Demikianlah, atas bantuan dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

Dekan,



Dr. Drs. H. Muh. Saif HM, M.Ag, MM
 NIP. 19620512 198903 1 003



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JL. ARIFIN AHMAD NO. 39 TELP. / FAX. (0761) 39399 PEKANBARU

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 071/BKBP-SKP/1605/2021



- a. Dasar : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah.
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian.
 5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru.
- b. Menimbang : Rekomendasi dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, nomor 503/DPMTSP/NON IZIN-RISET/41967 tanggal 22 Juni 2021, perihal pelaksanaan kegiatan Penelitian Riset/Pra Riset dan pengumpulan data untuk bahan Skripsi.

MEMBERITAHUKAN BAHWA :

1. Nama : RIFA'I ROFIQ
2. NIM : 11770513229
3. Fakultas : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL UIN SUSKA RIAU
4. Jurusan : ILMU ADMINISTRASI NEGARA
5. Jenjang : S1
6. Alamat : JL. KEDONDONG IX BLOK C4 NO. 20 KEL. PANDAU JAYA KEC. SIAK HULU-KAMPAR
7. Judul Penelitian : PERAN DINAS SOSIAL DALAM PEMBERDAYAAN PENYANDANG DISABILITAS DI KOTA PEKANBARU
8. Lokasi Penelitian : DINAS SOSIAL KOTA PEKANBARU

Untuk Melakukan Penelitian, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan dengan kegiatan Riset/Pra Riset/ Penelitian dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan Riset ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal Surat Keterangan Penelitian ini dibuat.
3. Berpakaian sopan, mematuhi etika Kantor/Lokasi Penelitian, bersedia meninggalkan photo copy Kartu Tanda Pengenal.
4. Melaporkan hasil Penelitian kepada Walikota Pekanbaru c.q Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru, paling lambat 1 (satu) minggu setelah selesai.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 23 Juni 2021

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Pekanbaru


ZULFAHMI ADRIAN, AP. M.Si
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19750715 199311 1 001

Tembusan

- Yth : 1. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA Riau di Pekanbaru.
 2. Yang Bersangkutan.



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU DINAS SOSIAL

Jalan Datuk Setia Maharaja No. 6 Pekanbaru, Telp. (0761) 22602
PEKANBARU - 28289

SURAT KETERANGAN MELAKUKAN RISET

Nomor : 071/Dinsos-Rehsos.1/ 609 /2021

Kepala Dinas Sosial Kota Pekanbaru dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **RIFA'I ROFIQ**
NIM/KTP : 11770513229
Jurusan : ILMU ADMINISTRASI NEGARA
Jenjang : SARJANA (S1)
Alamat : JL. KEDONDONG IX BLOK C4 NO. 20 KEL. PANDAU JAYA
KEC. SIAK HULU-KAMPAR

Lokasi Penelitian: DINAS SOSIAL KOTA PEKANBARU

Adalah benar telah menyelesaikan kegiatan penelitian riset/pras riset dalam rangka pengambilan data untuk keperluan penulisan skripsi dengan judul **"PERAN DINAS SOSIAL DALAM PEMBERDAYAAN PENYANDANG DISABILITAS DI KOTA PEKANBARU."**

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 02 Agustus 2021

a.n. Kepala Dinas Sosial Kota Pekanbaru
Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial



Drs. BUSTAMI, MM

Pembina

NIP. 19630813 198410 1 001

Tembusan :

- Yth. 1. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA Riau
2. Yang Bersangkutan

RIWAYAT HIDUP



Rifa'i Rofiq, dilahirkan di Pekanbaru pada tanggal 03 Juli 1999. Anak kedua dari empat bersaudara dari pasangan Bapak Wiyono dan Ibu Kipsiatun. Peneliti menyelesaikan pendidikan di SD Negeri 019 Pandau Jaya dan tamat pada tahun 2010 kemudian melanjutkan sekolah di MTsN Bukit Raya Pekanbaru dan selesai pada tahun 2013. Lalu melanjutkan pendidikan ke Sekolah Menengah Atas di SMA YLPI Pekanbaru dan selesai pada tahun 2016. Selanjutnya pada tahun 2017 peneliti melanjutkan Program Studi Strata-1 (S1) di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial pada program studi Ilmu Administrasi Negara (ANA) melalui jalur Mandiri.

Peneliti melakukan penelitian di Kantor Dinas Sosial Kota Pekanbaru, dengan judul penelitian **“Peran Dinas Sosial dalam Pemberdayaan Penyandang Disabilitas di Kota Pekanbaru”**. Hasil penelitian tersebut diuji dalam sidang munaqasah (Oral Comprehensif) pada hari Rabu, tanggal 17 November 2021 dan Alhamdulillah peneliti dinyatakan **LULUS** dan berhak menyandang gelar Sarjana Sosial melalui sidang Munaqasah Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.